LAMPIRAN XV

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA MALANG TAHUN 2018 -2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disetiap Provinsi dan Kota/ Kabupaten, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Disamping amanat penyusunan RPJMD kepada Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 juga mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra akan mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang diprasyaratkan untuk mengarahkan kepada pelayanan publik pada Perangkat Daerah dan Pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Malang, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pun diwajibkan untuk menyusun Renstra. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023 memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi kebijakan serta program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018-2023 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh *stakeholders* mulai dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Adapun proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018-2023 disusun dengan tahapan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

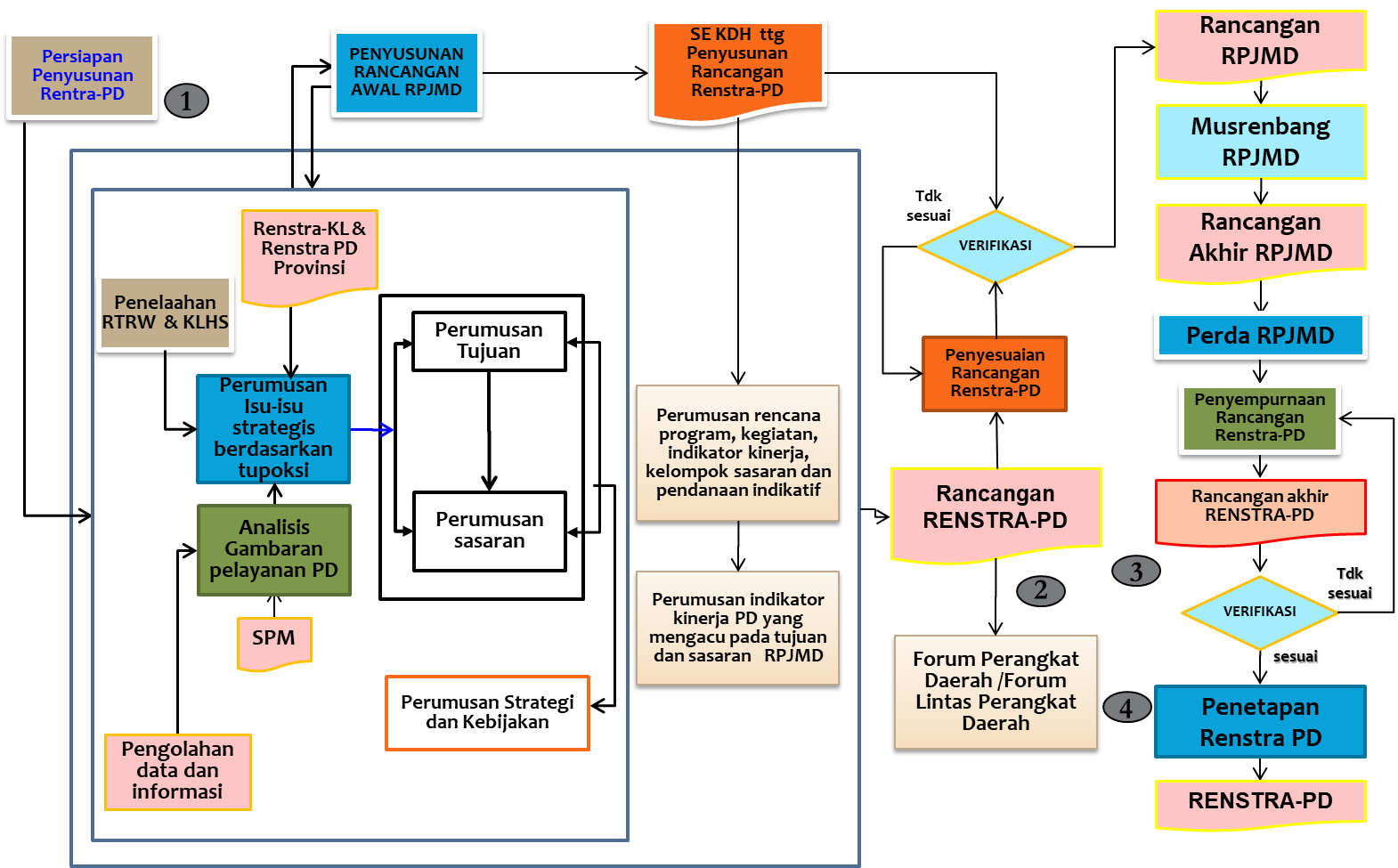
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas PerangkatDaerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SOPD



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan arah roda pembangunan sektor koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan di Kota Malang selama 5 tahun kedepan. Renstra juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan jika muncul permasalahan dalam isu strategis tersebut. Renstra juga menjadi salah satu acuan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu Renstra harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Dokumen Renstra yang ideal juga harus memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut ini :

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

Berdasarkan gambar 1.2 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Pada Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, Renstra Kementerian terkait dengan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019, RTRW Kota Malang 2018-2030 dan KLHS Kota Malang 2018-2022. Keselarasan antar dokumen Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018-2023 dengan dokumen-dokumen tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya sasaran pembangunan nasional secara berkesinambungan, khususnya sasaran pembangunan pada sektor perindustrian mulai dari pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah.

1. Landasan Hukum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur,Takar,Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
28. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 31 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Perindustrian 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota Tahun 2015:
33. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tanda Sah 2017;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 784);
38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM Daerah Kota Malang 2018-2023;
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
44. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan.
    1. Maksud dan Tujuan
45. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Periode 2018 - 2023, dimaksudkan untuk:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yangdilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018–2023;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai dengan baik;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2018-2023;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023;
5. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
6. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018–2023.
7. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang;
2. Terwujudnya rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pada pendahuluan memuat secara ringkas pengertian, fungsi, dan proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Berdasarkan tugas dan fungsi menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang telaahan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Malang, telaahan renstra K/L, telahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Uraian tersebut disesuaikan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dilakukan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi bersifat operasional serta dijabarkan dalam bentuk kegiatan, sedangkan arah kebijakan dirumuskan untuk membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Penentuan program dan kegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang.

BAB VII Penutup

Pada bab ini mengungkapkan tentang kesimpulan dari dokumen Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2018-2023. Serta berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkapelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tidak akan lengkap tanpa memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ulasan terkait sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta penjabaran capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada periode sebelumnya dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Sesuai PERDA Kota Malang No. 5 tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) huruf l disebutkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

**UPT**

**SUBBAGIAN KEUANGAN**

**SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**SUBBAGIAN PERENCANAAN**

**DINAS**

**SEKRETARIAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BIDANG PERDAGANGAN**

**BIDANG INDUSTRI**

**SEKSI KELEMBAGAAN**

**SEKSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN, DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI**

**SEKSI**

**PEMBERDAYAAN, FASILITAS DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**BIDANG USAHA MIKRO**

**SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN USAHA**

**SEKSI PERLINDUNGAN USAHA**

**SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO**

**BIDANG KOPERASI**

**SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN**

**SEKSI PEMBANGUNAN SUNBER DAYA INDUSTRI**

**SEKSI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI**

**SEKSI PEMEBRDAYAAN INDUSTRI**

**SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**SEKSI PENATAAN PASAR DAN PENATAAN PKL**

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Berdasarkan Gambar 2.1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang, dan kelompok fungsional seperti terdapat pada Gambar 2.1. Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari:
2. Subbagian Perencanaan;
3. Subbagian Keuangan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Koperasi, terdiri dari:
6. Seksi Kelembagaan;
7. Seksi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi;
8. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
9. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari:
10. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
11. Seksi Perlindungan Usaha;
12. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro.
13. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
14. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
15. Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
16. Seksi Pemberdayaan Industri.
17. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
18. Seksi Pengembangan Perdagangan;
19. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
20. Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL.
21. UPT; dan
22. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
2. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
4. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi;
5. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
6. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
7. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
9. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
10. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
11. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
14. Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
    * + - 1. Perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
          2. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
          3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
          4. Pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
          5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi serta kerjasama di lingkungan Dinas;
          6. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
          7. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
          8. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
          9. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
          10. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
          11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
          12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
          13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubaungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaandan kearsipan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
5. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparaturs negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
9. Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
10. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dengan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
14. Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;
15. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
16. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi;
17. Pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah dalam 1 (satu) daerah kota;
18. Pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
19. Pelaksanaan penetapan hasil penilaian hasil kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannnya dalam 1 (satu) daerah kota;
20. Pelaksanaan pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian yang keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
21. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
22. Pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang koperasi; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
25. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan;
26. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan;
27. Penyiapan bahan verifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah yang akurat;
28. Penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
29. Penyiapan bahan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
30. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
31. Penyiapan bahan fasilitasi kelembagaan dan penguatan koperasi;
32. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
33. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan; dan
34. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Pemberdayaan, Fasilitas dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi:
35. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi;
36. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
37. Penyiapan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
38. Penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha;
39. Penyiapan bahan pemberian fasilitasi akses permodalan bagi koperasi;
40. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
41. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi; dan
42. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
43. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
44. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
45. Penyiapan bahan penilaian kesehatan koperasi;
46. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administrasi bagi koperasi yang bermasalah;
47. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sebagai saksi ahli dalam penanganan permasalahan pidana maupun perdata yang dialami koperasi;
48. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
49. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
50. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
51. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
52. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
53. Perumusan program Bidang Usaha Mikro berdasarkan perencanaan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
54. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
55. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan usaha mikro;
56. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
57. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
58. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
59. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro; dan
60. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penguatan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha menyelenggarakan fungsi:
61. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
62. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
63. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
64. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
65. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha; dan
66. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Perlindungan Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Usaha menyelenggarakan fungsi:
67. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Usaha;
68. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
69. Penyiapan bahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
70. Penyiapan bahan pendampingan klinik bisnis usaha mikro;
71. Penyiapan bahan analisis data izin usaha mikro;
72. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan perlindungan usaha;
73. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
74. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
75. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
76. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha mikro;
77. Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran;
78. Penyiapan bahan promosi usaha mikro;
79. Penyiapan bahan kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
80. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
81. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
82. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
83. Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:
84. Perumusan program Bidang Perindustrian berdasarkan perencanaan strategis;
85. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
86. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
87. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
88. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
89. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
90. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5.1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
2. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri dan konsultan/penyuluh industri;
3. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan sumber daya alam/bahan baku;
4. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
5. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
3. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan Pemerintah Kota;
4. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi industri Kota;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana industri; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.3. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Industri;
2. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
3. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri;
4. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
5. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Industri; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
8. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
9. Perumusan program Bidang Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis;
10. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrologian, pasar rakyat dan penataan PKL;
11. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
12. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
13. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
14. Fasilitasi ketersediaan, pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pasokan barang, koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
15. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
16. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrologian, pasar rakyat dan penataan PKL;
17. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat;
18. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan di pasar rakyat;
19. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
20. Pelaksanaan penataan dan pengendalian pasar modern;
21. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha perdagangan;
22. Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
23. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
24. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi;
25. Penyediaan data dan informasi, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
26. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
27. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
28. Fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
29. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di Bidang Perdagangan;
30. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrologian, pasar rakyat dan penataan PKL; dan
31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
32. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan;
33. perencanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
34. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
35. Penyiapan bahan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
36. Penyiapan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
37. Penyiapan bahan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
38. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri,
39. Penyiapan bahan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
40. Penyiapan bahan koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
41. Penyiapan bahan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
42. Pembinaan, penyiapan data dan informasi terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
43. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
44. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian dan Pengawasan di Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
45. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
46. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan;
47. Penyiapan bahan pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pemantauan pasokan barang dan barang penting;
48. Penyiapan bahan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
49. Penyiapan bahan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunan pupuk bersubsidi;
50. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
51. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kemetrologian.
52. Penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan;
53. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
54. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
    1. Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL menyelenggarakan fungsi:
55. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL;
56. Perencanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL di seluruh Daerah;
57. Penyiapan bahan pembangunan, pemeliharaan dan revitalisasi pasar rakyat;
58. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
59. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data PKL di seluruh Daerah;
60. Penyiapan bahan penataan PKL di seluruh Daerah;
61. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan PKL di seluruh Daerah;
62. Penyiapan bahan relokasi PKL di seluruh Daerah;
63. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
64. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL; dan
65. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
66. Sumber Daya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
67. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugasnya sangat berkaitan dengan kualitas yang dimilikinya karena merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang perindustrian. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini merupakan susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:

Tabel 2.1 Data PNS Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Berdasarkan ESELON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN YANG DIDUDUKI | | | | | | | | JUMLAH |
| ESELON II | | ESELON III | | ESELON IV | | NON ESELON | |
| L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | IV/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | III/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | II/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN YANG DIDUDUKI | | | | | | | | JUMLAH |
| ESELON II | | ESELON III | | ESELON IV | | NON ESELON | |
| L | P | L | P | L | P | L | P |
|  | II/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | I/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | I/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | I/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | I/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SUKWAN / PTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | JUMLAH | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2019

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki komposisi aparatur seperti digambarkan di tabel 2.1, dimana eselon tertinggi adalah aparatur Eselon 2 yang diduduki oleh Kepala Dinas, dan aparatur eselon IIIa diduduki oleh seorang Sekretaris, eselon IIIb diduduki oleh Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Data PNS Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Berdasarkan Golongan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH | | JUMLAH | SUB  TOTAL |
| L | P |
| I. | 1. Pembina Utama Muda | IV/c | - | - | - |  |
|  | 2. Pembina TK. I | IV/b | - | - | - |  |
|  | 3. Pembina | IV/a | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| II. | 1. Penata TK. I | III/d | - | - | - |  |
|  | 2. Penata | III/c | - | - | - |  |
|  | 3. Penata Muda TK. I | III/b | - | - | - |  |
|  | 4. Penata Muda | III/a | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| III. | 1. Pengatur TK. I | II/d | - | - | - |  |
|  | 2. Pengatur | II/c | - | - | - |  |
|  | 3. Pengatur Muda TK. I | II/b | - | - | - |  |
|  | 4. Pengatur Muda | II/a | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| IV. | 1. Juru TK. I | I/d | - | - | - |  |
|  | 2. Juru | I/c | - | - | - |  |
|  | 3. Juru Muda TK. I | I/b | - | - | - |  |
|  | 4. Juru Muda | I/a | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| V. | PTT | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Total |  | - | - |  | 0 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah golongan I/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c. Sedangkan Penggolongan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Data PNS Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|
| 1 | SD | - | - | - |
| 2 | SLTP | - | - | - |
| 3 | SLTA | - | - | - |
| 4 | SARJANA MUDA / DIII | - | - | - |
| 5 | S-1 | - | - | - |
| 6 | S-2 | - | - | - |
| 7 | S-3 | - | - | - |
|  | JUMLAH | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2019

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa pendidikan terendah aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah Sekolah Dasar (SD), sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar kinerja dapat semakin meningkat. Bagi aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemetaan SDM | Jenis Pendidikan/Pelatihan | | |
| Diklat Kepemimpinan | Fungsional umum | Teknis |
| Struktural | - | - | - |
| Fungsional | - | - | - |
| Staff | - | - | - |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2019

1. Sumber Daya Aset/Modal

Selain sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

| No | Nama Inventaris | Jumlah | Kondisi | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | Sedang | Rusak |
| 01 | Kendaraan |  |  |  |  |
| Mobil | 19 | 16 | 3 |  |
| VIAR | 8 | 8 |  |  |
| Motor | 30 | 11 | 4 |  |
| Truk | 11 |  |  |  |
| 02 | Bangunan | 36 | 36 |  |  |
| 03 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pagar depan dan pagar samping) | 1 | 1 |  |  |
| 04 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen ( kanopi parker depan kantor) | 1 | 1 |  |  |
| 05 | Tanah | 36 | 36 |  |  |
| 06 | Mesin Ketik Elektrik Portabel | 1 | 1 |  |  |
| 07 | Mesin Tik Manual | 5 | 5 |  |  |
| 08 | Mesin Penghancur Kertas | 1 | 1 |  |  |
| 09 | Lemari Besi | 32 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | Filing Besi/ Metal | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | Lemari Penyimpan | 40 | 29 | 1 |  |
| 12 | Band Kas | 1 | 1 |  |  |
| 13 | Lemari Kaca | 5 |  | 5 |  |
| 14 | Lemari Kayu | 12 | 12 |  |  |
| 15 | Lemari Es | 2 | 2 |  |  |
| 16 | Lemari Arsip | 8 | 8 |  |  |
| 17 | Rak Kayu | 13 | 13 |  |  |
| 18 | Rak Besi | 1 |  | 1 |  |
| 19 | Rak Peralatan | 1 | 1 |  |  |
| 20 | *Buffet* Kayu | 1 | 1 |  |  |
| 21 | Papan Tulis | 6 | 6 |  |  |
| 22 | *White Board* | 2 | 2 |  |  |
| 23 | Papan Nama | 15 | 15 |  |  |
| 24 | Papan Nama Instansi | 20 | 19 |  | 1 |
| 25 | Papan Himbauan | 50 | 50 |  |  |
| 26 | *Sofa Set* | 18 | 6 |  | 2 |
| 27 | Fitras+Gordyn | 5 | 5 |  |  |
| 28 | *Ac* | 39 | 6 | 12 | 1 |
| 29 | *Sound Sistem* | 11 | 10 | 1 |  |
| 30 | Televisi | 22 | 11 |  | 1 |
| 31 | *Pc Unit* | 101 | 40 | 3 | 3 |
| 32 | *Laptop* | 55 | 15 | 12 | 5 |
| 33 | *Notebook* | 8 | 8 |  |  |
| 34 | Telepon | 8 | 2 | 6 |  |
| 35 | *Printer* | 112 | 48 | 11 | 18 |
| 36 | Alat Penyimpan Data | 2 |  |  | 2 |
| 37 | *Hard Disc* | 9 | 8 |  | 1 |
| 38 | *Server* | 11 | 10 |  |  |
| 39 | *Scanner* | 5 | 2 | 1 |  |
| 40 | Meja Kerja | 138 | 50 |  | 8 |
| 41 | Meja Rapat | 5 | 4 | 1 |  |
| 42 | Meja Kayu/Rotan | 34 |  | 26 | 8 |
| 43 | Meja Besi | 40 | 40 |  |  |
| 44 | Meja Komputer | 8 | 8 |  |  |
| 45 | Kursi Besi | 40 | 40 |  |  |
| 46 | Kursi Biasa | 2 |  |  | 2 |
| 47 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 2 |  |  | 2 |
| 48 | Kursi Kerja Pejabat | 27 | 27 |  |  |
| 49 | Kursi Rapat | 5 |  | 5 |  |
| 50 | Kursi Tamu | 4 |  | 4 |  |
| 51 | Kursi Kerja | 46 | 35 | 11 | 1 |
| 52 | Kursi Lipat | 78 | 78 |  |  |
| 53 | Kursi Putar | 76 | 71 |  | 5 |
| 54 | Kamera Elektronik | 12 | 7 | 5 |  |
| 55 | Lensa Kamera | 1 |  | 1 |  |
| 56 | *Camera + Attachment* | 1 |  | 1 |  |
| 57 | *Camera Wall Box* | 4 | 4 |  |  |
| 58 | Handycam | 3 | 2 |  | 1 |
| 59 | Proyektor | 7 | 4 | 3 |  |
| 60 | Slide Proyektor | 1 |  | 1 |  |
| 61 | *Mainframe* | 9 |  |  | 9 |
| 61 | HT | 13 | 13 |  |  |
| 62 | Mesin Fax | 3 | 2 | 1 |  |
| 63 | PABX | 5 | 5 |  |  |
| 64 | CCTV | 4 | 4 |  |  |
| 65 | Mesin Absensi | 11 | 11 |  |  |
| 66 | *Kicthern Set* | 1 | 1 |  |  |
| 67 | Mesin Jahit | 30 | 30 |  |  |
| 68 | *Packaging Machine* | 2 | 2 |  |  |
| 69 | *Mini Computer* | 15 | 12 | 3 |  |
| 70 | *Computer Compatible* | 5 | 5 |  |  |
| 71 | *UPS* | 26 | 24 |  | 2 |
| 72 | Gerobak Sampah | 120 | 120 |  |  |
| 73 | Tempat Sampah | 43 | 43 |  |  |
| 74 | Tong Sampah | 16 | 16 |  |  |
| 75 | Alat Kebersihan | 13 | 13 |  |  |
| 76 | Timbangan | 37 | 37 |  |  |
| 77 | Alat Tera | 23 | 23 |  |  |
| 78 | Tabung Pemadam | 90 | 90 |  |  |
| 79 | Pompa Air | 3 | 3 |  |  |
| 80 | Tangga Alminuim | 1 |  | 1 |  |
| 81 | Tenda | 7 | 5 |  | 2 |
| 82 | Lain – Lain | 5 |  |  | 5 |
| 83 | Tangki Perebusan | 27 | 27 |  |  |
| 84 | Pedal Sealer | 22 | 22 |  |  |
| 85 | Tungku Kompor | 22 | 22 |  |  |
| 86 | Meja Peragian | 22 | 22 |  |  |
| 87 | Mesin pengupas Kulit kedelai | 22 | 22 |  |  |
| 88 | Mesin Peniris/Spiner | 22 | 22 |  |  |
| 89 | Mesin Bordir | 3 | 3 |  |  |
| 90 | Mesin Obras | 3 | 3 |  |  |
| 91 | Mesin ketik | 5 | 5 |  |  |
| 92 | Mesin perajang | 21 | 21 |  |  |
| 93 | Papan Visual | 5 | 5 |  |  |
| 94 | Loker Katun | 3 | 3 |  |  |
| 95 | Layar Film | 1 | 1 |  |  |

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019

* 1. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Malang

1. Persentase Koperasi di Kota Malang

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus :

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Koperasi aktif | x 100 |
| Jumlah seluruh Koperasi |

Gambar 2.2 Persentase Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 2019

Gambar di atas menunjukkan perkembangan persentase koperasi aktif yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan koperasi di Kota Malang. Koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), yang diharapkan akan menjadi koperasi sehat dan berkualitas. Keberadaan koperasi sehat dan berkualitas merupakan penunjang dalam menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu sektor pembentuk pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan data keragaan koperasi, Kota Malang merupakan kota dengan peningkatan jumlah koperasi aktif terbanyak ke tiga dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif yang sudah bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) sebanyak 317 koperasi dari total jumlah koperasi sebanyak 341 koperasi atau sebesar 92%.

1. Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang

Perkembangan Usaha Mikro di Kota Malang semakin meningkat. Namun demikian, sebagian besar Usaha Mikro sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, pemerintah perlu membantu usaha informal untuk berkembang menjadi formal. Berdasarkan tabel data binaan kelompok usaha mikro selama tahun 2014 sampai dengan 2018, terlihat dari indikator sasaran % wirausaha mikro binaan yang berkembang dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah wirausaha mikro binaan yang berkembang | X 100 % |
| Jumlah seluruh wirausaha mikro binaan |

Gambar 2.3 Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 2019

Gambar di atas menunjukkan dari target sebesar 7,90 % dan terealisasi sebesar 7,94 % diperoleh hasil capaian sebesar 100,51 %. Termasuk kategori sangat berhasil namun masih dijumpai permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan yaitu:

* 1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data base belum tercapai secara maksimal disebabkan karena keterbatasan waktu dan sumber daya manuasia dalam melaksanakan pendataan . Untuk kedepannya dalam menyusun database sesuai sub sektor baik dari OPD maupun pihak ketiga dalam menyelesaikan penyusunan database yang valid dengan menggunakan Online Data Sistem (ODS) usaha Mikro

1. Dalam memfasilitasi Promosi pameran bagi produk usaha mikro masih secara manual belum dilakukan pemasaran produk usaha mikro secara online untuk kedepannya diharapkan untuk memfasilitasi promosi produk Usaha mikro secara online.
2. SDM UM belum memahami tentang periijin produk UM, baik secara legalitas maupun perlindungan Usahanya untuk kedepannya akan ditingkatkan dalam melakukan pembinaan Usaha Mikro secara intensif melalui kegiatan Klinik bisnis Usaha mikro tingkat kecamatan , sosialisasi/workshop tentang perijinan usaha mikro yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Persentase Pertumbuhan wirausaha Mikro Baru Binaan

Persentase Pertumbuhan wirausaha Mikro Baru Binaan yang mempunyai target sebesar 14,47%, realasasi sebeasar 14,47% capaian Indikator sebesar 100% capaian tersebut masuk kategori sangat berhasil namun Usaha Mikro di Kota Malang masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya kedepan dapat berdaya saing diera pasar global, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan kesejahteraan masyarakat, terhadap permasalahan tersebut OPD dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pembina koperasi dan Usaha mikro dengan berupaya secara intensif untuk melakukan pembinaan ketrampilan melalui pelatihan ketingkat lanjutan bagi masyarakat/tenaga kerja. Dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| % ∑ wirausaha mikro baru tahun n - ∑ wirausaha mikro baru tahun n-1 | X 100% |
| ∑ wirausaha mikro baru tahun n-1 |

Gambar 2.4 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Mikro Baru Binaan

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 2019

* + 1. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Malang

1. Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kota Malang

Kinerja sektor industri di Kota Malang, salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan industri pengolahan. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/*makloon* dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Gambar 2.5 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 2019

Menurut Data terakhir BPS kota Malang (BPS, 2017) sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan daerah dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Malang. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dari tiga besar penyumbang PDRB tertinggi di Kota Malang. Tiga besar sektor penyumbang PDB tertinggi salah satunya adalah Sektor Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 25.40%.

1. Persentase PDRB Industri Kota Malang

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memilki prospek potensial untuk dikembangkan. Salah satu penyumbang dalam PDRB adalah sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Laju pertumbuhan sektor industri yang positif tetapi kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.6 Persentase PDRB Industri

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 2019

Sebagai gambaran kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Malang dalam kurun lima tahun terakhir, berdasarkan gambar 2.6 tersebut dapat kita lihat bahwa laju persentase PDRB Industri telah mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena meningkatnya beberapa sektor lain terutama sektor perdagangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman serta jasa.

1. Pertumbuhan Jumlah IKM di Kota Malang

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia memegang peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Pengembangan IKM sangat sejalan dengan visi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Pemerintah mendorong penyebaran dan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali di Kota Malang, dimana IKM tumbuh subur setiap tahunnya.

Gambar 2.7 Pertumbuhan Jumlah IKM

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 2019

Berdasarkan gambar 2.7 tersebut, pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2013 yang menyentuh angka 3.601, yang kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3.012 yang pada tahun 2015 dan 2016 naik tipis menjadi 3.041 dan 3.045, kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2017 menjadi 3355.

2.3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Malang

1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan

Peningkatan nilai ekspor sub sektor perdagangan Kota Malang pada periode 2014-2018 menunjukkan tren yang relatif menurun, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.8 Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 2019

Jika dilihat dari persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan, terindikasi bahwa kinerja perdagangan yang tercermin dari defisit/surplus nett ekspor dari tahun 2014-2018 mengalami defisit dan cenderung mengalami penurunan nilainya. Tahun 2016 surplus net-ekspor perdagangan Kota Malang sebesar 3.133% (merupakan nilai terbesar dalam 5 tahun terakhir).

1. Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) Bertanda Tera Sah

Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan. Untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian, Dinas Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis, salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam negeri. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Dinas Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP). Sehingga Dinas Perdagangan melaksanakan tera/tera ulang yang bertujuan untuk menjamin alat UTTP yang berstandar dan tidak merugikan konsumen, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.9 Jumlah UTTP bertanda tera sah

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 2019

1. Persentase PKL yang Ditata dan Direlokasi

Salah satu aktivitas penting yang terjadi di kota adalah aktivitas perdagangan. Menurut Hariyono (2007) terdapat dua sektor perdagangan dalam perkotaan yaitu sektor formal dan informal. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL adalah salah satu perdagangan sektor informal. Keberadaan PKL merupakan fenomena khas dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyebab jumlah PKL meningkat adalah munculnya gejala frontierisme, yakni suatu pandangan tentang adanya suatu lahan kosong yang harus dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Disamping itu jumlah pengangguran yang meningkat juga diiringi dengan tidak adanya keseriusan dan ketegasan Pemerintah untuk menjalankan UU atau Perda tentang penataan ruang. Kota Malang juga tak luput dari masalah diatas, hal ini bisa dilihat dari adanya kelompok-kelompok PKL yang berkelompok atau berjajar di koridor jalan utama. PKL umumnya menempati badan jalan, trotoar dan terletak diatas saluran drainase. Hal tersebut menimbulkan kesan kumuh karena wujud fisik yang tidak beraturan. Disatu sisi PKL menjadi tawaran yangtetap diminati dan dibutuhkan masyarakat. Karena kegiatan tersebut juga menghidupkan suasana jalan dimalam hari, memberikan kontribusi penting dikehidupan suasana membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat perkotaan (Hariyono, 2007). Namun disisi lain keberadaan PKL seringkali menimbulkan kesan kumuh.

Relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah banyak yang mengalami kegagalan karena tempat tujuan relokasi dianggap tidak mampu mewadahi kegiatan perdagangan dengan maksimal seperti lokasi sebelumnya, akibatnya PKL tidak mau direlokasi kedaerah baru. Penertipan juga tidak mampu menghalangi para PKL berjualan, karena mereka merasa berhak menggunakan ruang kota. PKL akan terus hidup selama masyarakat membutuhkan keberadaanya sebagai sarana perdagangan dengan harga murah dan lokasi keberadannya sebagai sarana perdagangan dengan harga murah dan lokasi mudah dijangkau. Tetapi lemahnya aspek pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sektor informal di Kota Malang belum mendorong dilaksanakannya tata kelola yang baik (*goodgovernance*), mengenai permasalahan PKL.

Gambar 2.10 PKL yang ditata dan direlokasi

*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 2019*

1. Persentase Revitalisasi Pasar Rakyat

Dinas Perdagangan berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melakukan program revitalisasi pasar rakyat. Program ini merupakan salah satu program pemerintah. Adapun target revitalisasi selama periode 2014-2018 yaitu sebanyak 6 (enam) pasar. Pasar rakyat merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan revitalisasi, eksistensi pasar rakyat akan tetap kuat dan daya saingnya terhadap toko-toko modern dapat meningkat sehingga dapat memajukan ekonomi kerakyatan. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tentunya dapat meningkatkan citra dan meninggalkan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian Dinas Perdagangan melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu pasar rakyat saat ini sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional.

Gambar 2.10 Revitalisasi Pasar Rakyat

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 2019

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK /SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Derah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase Koperasi Aktif |  |  |  | 71,71% | 74,39% | 76,24% | 79,01% | 80,95% | 71,71 % | 74,39% | 76,44% | 78,94% | 88,69% | 100% | 100% | 100,26% | 99,91% | 109,56 % |
| 2 | Persentase UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan Usaha |  |  |  | 73,32% | 75,78 % | 77,64 % | - | - | 73,32% | 75,78 % | 77,79 % | - | - | 100% | 100% | 102,65% | - | - |
| 3 | Persentase UKM yang mengakses sistem pendukung usaha |  |  |  | 56,90% | 59,76% | 67,86 % | - | - | 56,90 % | 59,76% | 70,59% | - | - | 100% | 100% | 104,02% | - | - |
| 4 | Persentase wirausaha mikro binaan yang berkembang |  |  |  | - | - | - | 4,89% | 7,90% | - | - | - | 4,67% | 7,94 % | - | - | - | 95,50% | 100,51 % |
| 5 | Persentase Pertumbuhan wirausaha Mikro Baru Binaan |  |  |  | - | - | - | 5,46% | 14,47% | - | - | - | 5,25% | 14,47% | - | - | - | 96,15% | 100 % |
| 6 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Koperasi dan UM |  |  |  | 73,58 | 74,97 | 76,67 | 77,87 | 79,02 | - | 74,97 | 77,21 | 81,76 | 81,78 | - | 100% | 100,70% | 105% | 103,49% |
| 7 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Industri | - | - | - | 69,97 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82.87 | 70.60 | 75.18 | 81.43 | 81.13 | 118,43 | 98,05 | 101,59 | 107,14 | 101 |
| 8 | Persentase PDRB Sektor Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Telematika, Elektronika, Tekstil, dan Aneka | - | - | - | 2,1% | 2,15% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 1,98% | 1,93% | 1,86% | 1,77% | 1,69% | 94,28 | 89,76 | 84,54 | 76,95 | 70,41 |
| 9 | Persentase PDRB Sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Terhadap Total PDRB | - | - | - | 26,25% | 26,35% | 26,45% | 26,55% | 26,65% | 26,26% | 25,21% | 24,64% | 23,63% | 23,43% | 100,03 | 95,67 | 93,33 | 89,00 | 87,91 |
| 10 | Presentase peningkatan nilai ekspor perdagangan. |  | 10.16% |  | - | - | - | 8.96% | 10.16% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0 | 0 |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK / SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Derah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 11 | Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah |  | 14.473 |  | - | - | - | 14.000 | 17.000 | - | - | - | 14.341 | 17.117 | - | - | - | 102.44 | 100.69 |
| 12 | Persentase PKL yang ditata dan direlokasi. |  | 7% |  | - | 1.48% | 6.06% | 6% | 7% | - | 5.71% | 5.98% | 0% | 6.48% | - | 385.81% | 98.68% | 0 | 92.57 |
| 13 | Presentase revitalisasi pasar rakyat. |  | 21.43% |  | - | 17.86% | 21.43% | 17.86% | 21.43% | - | 10.71% | 14.28% | 17.86% | 29.63% | - | 59.97% | 66.64% | 1.00 | 138.26 |
| 14 | Survey Kepuasan Masyarakat. |  | 80 |  | - | 76.13 | 78 | 79 | 80 | - | 79.53 | - | 80.32 | 77.86 | 78.20 | 104.45 | 100.26 | 101.67 | 97.33 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | - | - | - | 2,510,598,500 | 1,394,437,500 | - | - | - | 2,416,305,330 | 1.348.656.105 | - | - | - | 96.24% | 96.71% |  |  |
| 2 | Program pengembagangn kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah | - | - | - | 3,137,814,000 | 3,076,774,500 | - | - | - | 2,023,500,650 | 2.941.617.948 | - | - | - | 94.65% | 95.60% |  |  |
| 3 | Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah | - | - | - | 3,230,215,600 | 210,000,000 | - | - | - | 3,194,971,850 | 201.865.000 | - | - | - | 98,91% | 96.12% |  |  |
| 4 | Program Pengembangan Koperasi | - | - | - | 212,295,000 | 320,100,000 | - | - | - | 182,438,900 | 289.883.500 | - | - | - | 85.94% | 90.56% |  |  |
| 5 | Program Pengawasan Koperasi | - | - | - | 937,000,000 | 722,500,000 | - | - | - | 720,538,100 | 673.086.750 | - | - | - | 76.90% | 93.16% |  |  |
| 6 | Program Pengembangan Usaha Mikro | - | - | - | 255,000,000 | 325,000,000 | - | - | - | 209,492,750 | 215.372.000 | - | - | - | 93.11% | 66.27% |  |  |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | 15,576,932,000 | 23,094,119,800 | - | - | - | 13,983,164,823 | 18.630.132.600 | - | - | - | 89.77% | 80.675 |  |  |
| 8 | Program Peningatan Sarana Prasarana Aparatur | - | - | - | 2,442,145,000 | 2,494,165,000 | - | - | - | 1,884,749,283 | 1.749.900.345 | - | - | - | 77.18% | 70.16% |  |  |
| 9 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | - | - | - | - | 610,000,000 | - | - | - | - | 542.463.058 | - | - | - | - | 88.93% |  |  |
| 10 | Program Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan | - | - | - | - | 500,00,000 | - | - | - | - | 433.670.135 | - | - | - | - | 86.73% |  |  |
| 11 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Industri |  |  |  | 1.103.403.500,00 | 1.733.490.000 |  |  |  | 931.016.546,00 | 547.038.620 |  |  |  | 84,37% | 94.16% |  |  |
| 12 | Persentase PDRB Sektor Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Telematika, Elektronika, Tekstil, dan Aneka |  |  |  | 2.250.860.500,00 | 2.884.020.000 |  |  |  | 2.109.303.800,00 | 2.681.965.725 |  |  |  | 93,71% | 93% |  |  |
| 13 | Persentase PDRB Sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman Terhadap Total PDRB |  |  |  | 3.949.236.000,00 | 4.907.909.000 |  |  |  | 3.393.280.630,00 | 3.127.868.558 |  |  |  | 85,92% | 63.73% |  |  |
| 14 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | 2,510,598,500 | 1,394,437,500 | - | - | - | 2,416,305,330 | 1.348.656.106 | - | - | - | 96.24 | 96.72 |  |  |
| 15 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | - | 2.137.814.000 | 3,076,774,500 | - | - | - | 2,023,500,650 | 2.941.617.948 | - | - | - | 94.65 | 95.61 |  |  |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | - | 3,230,215,600 | 210,000,000 | - | - | - | 3,194,971,850 | 201.865.000 | - | - | - | 98,91 | 96.13 |  |  |
| 17 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan keuangan | - | - | - | 212,295,000 | 320,100,000 | - | - | - | 182,438,900 | 289.883.500 | - | - | - | 85.94 | 90.56 |  |  |
| 18 | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | - | - | - | 937,000,000 | 722,500,000 | - | - | - | 720,538,100 | 673.086.750 | - | - | - | 76.90 | 93.16 |  |  |
| 19 | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | - | - | - | 255,000,000 | 325,000,000 | - | - | - | 209,492,750 | 215.372.000 | - | - | - | 93.11 | 66.27 |  |  |
| 20 | Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar | - | - | - | 15,576,932,000 | 23,094,119,800 | - | - | - | 13,983,164,823 | 18.630.132.600 | - | - | - | 89.77 | 80.67 |  |  |
| 21 | Pengembangan Usaha Perdagangan | - | - | - | 2,442,145,000 | 2,494,165,000 | - | - | - | 1,884,749,283 | 1.749.900.345 | - | - | - | 77.18 | 90.01 |  |  |
| 22 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrologian | - | - | - | - | 610,000,000 | - | - | - | - | 542.463.058 | - | - | - | - | 88.93 |  |  |
| 23 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasar | - | - | - | - | 500,00,000 | - | - | - | - | 433.670.135 | - | - | - | - | 86.73 |  |  |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

* 2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Kota Malang mempunyai karakteristik wilayah perkotaan dengan kegiatan perekonomian utama berupa perdagangan, jasa, dan industri. Terdapat tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan untuk dapat mengantisipasi ancaman dan mengoptimalkan kekuatan yang ada antara lain:

1. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi, usaha mikro, usaha dagang kecil, industri kecil dan menengah.
2. Rendahnya produktivitas koperasi, usaha mikro, usaha dagang kecil, industri kecil dan menengah.
3. Rendahnya daya saing koperasi, usaha mikro, usaha dagang kecil, industri kecil dan menengah ditengah situasi persaingan yang terbuka pada era globalisasi.
4. Minimnya kepemilikan legalitas usaha mikro, usaha dagang kecil, industri kecil dan menengah.
5. Kurangnya regenerasi pelaku koperasi, industri kecil dan menengah.
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, usaha mikro, usaha dagang kecil, industri kecil dan menengah belum maksimal.
7. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yaitu kinerja koperasi yang belum optimal, komposisi koperasi yang masih didominasi koperasi sektor jasa keuangan. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajamen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
8. Minimnya kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan sektor koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah, dan usaha dagang kecil.
9. Rendahnya Akurasi data koperasi dan Usaha Mikro. Perlu adanya pengklasifikasian koperasi dari yang levelnya pemula, menengah sampai yang sudah mandiri, indikator keberhasilan koperasi perlu digeser dari indikator yang materiil ke arah indikator kesejahteraan anggota, bahkan dampak sosial dari koperasi tersebut.
10. Belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi bagi pelaku usaha mikro, usaha dagang kecil serta industri kecil dan menengah.
11. Pemasaran usaha Mikro, usaha dagang kecil serta industri kecil dan menengah sebagian besar masih menggunakan metode konvensional.
12. Pengembangan kawasan industri tidak dimungkinkan di Kota Malang karena sudah dikepung oleh kawasan permukiman serta minimnya Ruang Terbuka Hijau.
13. Rendahnya jumlah industri yang menerapkan industri hijau, sehingga dikhawatirkan dapat memberi dampak negative terhadap lingkungan.
14. Harga barang pokok dan bahan penting lainnya sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh ketersediaan barang, memerlukan pemantuan dan pengendalian yang ketat terhadap harga dan pasokan bahanpokok dan barang penting lainnya.
15. Belum tersedianya data supplier bahan pokok dan barang penting lainnya sebagai penunjang marketing inbound.
16. Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha ekspor dan pergudangan dalam menyampaikan menyampaikan laporan realisasi ekspor dan perkembangan gudang.
17. Lemahnya akurasi dan kurangnya sumber data ekonomi yang diperlukan sebagai bahan penyusun kebijakan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
18. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dagang dalam hal legalitas usaha, tertib ukur dan standarisasi produk.
19. Tingginya laju impor barang dari luar daerah dan luar negeri.

Sedangkan peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, antara lain:

1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku koperasi, usaha mikro, usaha dagang dan industri kecil menengah.
2. Jumlah koperasi, usaha mikro, usaha dagang dan industri kecil menengah yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula dalam menggerakkan perekonomian daerah.
3. Pengembangan perwilayahan industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan sentra-sentra industri karena sentra industri dapat berkembang di kawasan permukiman.
4. Banyaknya program pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha dagang, industri kecil dan menengah dari pemerintah maupun swasta.
5. Terdapat bantuan kemudahan akses permodalan dari instansi swasta maupun pemerintah.
6. Terbukanya peluang kerjasama dengan stakeholders yang semakin luas. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi yang baik, tuntutan profesi dan tanggung jawab sosial dari stakeholders.
7. Perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat mendukung perkembangan sektor koperasi, usaha mikro, usaha dagang, industri kecil menengah terutama pada aspek pemasaran.
8. Meningkatnya indeks daya beli konsumen atas produk pangan.
9. Jumlah Pelaku Usaha yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
10. Iklim usaha yang semakin kondusif.
11. Meningkatnya cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku sehingga berdampak pada peningkatan potensi PAD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

Terdapat permasalahan dan isu strategis yang perlu dicermati dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2018-2023. Permasalahan dan isu yang berkaitan dengan sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan perlu diidentifikasi dan ditelaah lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam menentukan arah penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Hadirnya berbagai isu yang menghiasi sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan belakangan ini, telah menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan agar mampu bertahan dan tak tergerus oleh perkembangan zaman. Hal tersebut menjadi satu hal yang penting dalam menjalankan tata pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menjalankan perannya dalam menyelesaikan permasalahan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan disuatu daerah. Seiring dengan perkembangan era saat ini, muncul permasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar. Tabel berikut menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Penyebab Masalah | Faktor-faktor yang mempengaruhi | | Akar Masalah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internal | Eksternal |
| BIDANG KOPERASI | | | | | | |
| 1 | Rendahnya jumah koperasi sehat | Banyaknya koperasi yang belum memenuhi standar kelembagaan | Terbatasnya pengetahuan/skill para pengurus koperasi di bidang menejemen pengelolaan koperasi | Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi | Rendahnya minat masyarakat untuk berkecimpung dalam usaha perkoperasian | Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan |
|  |  |  |  | Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi | Struktur kelembagaan koperasi pada umumnya masih terbatas pada KSP dan USP | Belum dilaksanakannya pengelolaan/manajemen koperasi sesuai dengan perundang-undangan di bidang koperasi dan kurangnya pengembangan usaha koperasi |
|  |  | Masih banyaknya koperasi yang terancam likuidasi | Banyaknya koperasi yang tidak melakukan aktifitas usaha | Rendahnya keikutsertaan anggota koperasi | Rendahnya minat masyarakat terhadap koperasi | Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang penting dan manfaat berkoperasi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIDANG USAHA MIKRO | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan usaha mikro | Perkembangan usaha mikro cenderung melam bat | Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro | Fasilitasi dan kemitraan dan pembiayaan pelaku UM belum optimal | Lemahnya ekosistem kolaborasi pemberdayaan usaha mikro | Belum optimalnya penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku Usaha Mikro |
|  |  |  | kurangnya fasilitasi untuk wirausahabaru | Belum maksimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan | Minimnya regulasi daerah yang mendukung pertumbuhan usaha mikro |
| BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | |
| 1 | Sumber Daya Manusia | Kompetensi Aparatur | Pengetahuan dan pemahaman aparatur terkait isu perindustrian yang belum optimal | Tingkat pemahaman tiap aparatur dalam menyikapi isu bervariasi | Kondisi perindustrian yang semakin dinamis | Kompetensi Aparatur kurang memadai dalam mengantisipasi isu perindustrian |
|  |  | Reformasi birokrasi yang belum optimal | Evaluasi kompetensi Aparatur tidak optimal | Dukungan pemerintah pusat dalam mempermudah pemahaman aparatur belum optimal | Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional |
|  |  | Kompetensi Tenaga Kerja Industri | Minimnya pengetahuan pelaku industri | Sebagian besar pelaku industri tidak berpendidikan tinggi, serta cakupan pembinaan kompetensi yang terbatas. | Fasilitas peningkatan kompetensi untuk pelaku industri masih terbatas | Rendahnya pemahaman pelaku industri, khususnya IKM, dalam upaya pengembangan industri |
|  |  | Proses pendirian lembaga sertifikasi yang cukup panjang | Alur pendirian lembaga dan proses legalitasnya yang masih berbelit-belit | Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terkait LSP dan TUK | Minimnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) |
|  |  | Minimnya sosialisasi TUK dan LSP | Program sosialisasi yang belum optimal | Informasi dari media tentang TUK dan LSP yang tidak masif kepada masyarakat | Ketidaktahuan masyarakat dengan adanya TUK dan LSP |
|  |  | Kurangnya upaya kolaborasi dengan lembaga pendidikan | Upaya kerjasama yang kurang masif | Minimnya wadah kolaborasi antar stakeholders | Belum dilakukannya kerjasama secara intensif dengan lembaga pendidikan bidang industri berbasis kompetensi (tidak overlapping dengan kewenangan provinsi) |
| 2 | Sarana dan Prasarana Industri | Standarisasi Industri | Penerapan kebijakan terkait HKI yang belum efektif | Sosialisasi terkait HKI yang dilakukan belum efektif | Sikap tanggap masyarakat terkait HKI yang masih minim | Minimnya standarisasi produk industri serta perlindungan HKI yang belum optimal |
|  |  |  | Proses pendirian lembaga sertifikasi yang cukup panjang dan membutuhkan dana cukup besar | Keterbatasan anggaran dalam mendirikan lembaga sertifikasi | Pengetahuan terkait sertifikasi dan inkubator industri masyarakat masih minim | Belum adanya lembaga sertifikasi produk dan penyediaan laboratorium untuk menguji standariasi produk industri (Inkubator Industri) |
|  |  | Sistem Informasi Industri | Kompetensi SDM yang belum optimal dalam sistem informasi industri | Kesenjangan penguasaan terkait sistem informasi industri | Bantuan fasilitas yang masih terbatas | Sistem informasi perindustrian belum berjalan dengan optimal |
|  |  | Penerapan sistem informasi industri yang belum merata | Terbatasnya SDM aparatur dalam penerapan sistem informasi industri | Kondisi perindustrian yang dinamis | Lemahnya validasi dan updating database perindustrian yang realtime yang mampu menggambarkan kondisi perindustrian terkini |
|  |  | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri | Belum optimalnya kolaborasi | Wadah kolaborasi yang masih terbatas | Pelaku IKM beberapa enggan untuk di intervensi | Kurang memaksimalkan keterlibatan stakeholder (Colaborative Governance) terhadap industri kecil. |
|  |  |  | Penguasaan teknologi masih minim | Biaya penyediaan bantuan teknologi yang cukup mahal | Kompetensi terkait teknologi pada SDM IKM yang minim | Minimnya pemanfaatan teknologi bagi IKM |
|  |  |  | Kolaborasi terkait riset yang belum optimal | Biaya riset yang terbatas | Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara lembaga | Rendahnya sinergisitas riset pengembanga teknologi dengan lembaga riset |
|  |  | Pengembangan Kreativitas dan Inovasi | Biaya pengadaan sarana prasarana yang cukup besar | Dana anggaran dinas yang terbatas | Daya kreativitas dan inovasi yang belum optimal | Belum adanya penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi |
|  |  | Belum optimalnya pengembangan kawasan perwilayahan industri | Terbatasnya lahan untuk kawasan perwilayahan industri | Masyarakat tidak menghendaki adanya pengembangan kawasan industri maupun kawasan peruntukan industri | Terbatasnya kawasan peruntukan industri bagi pengembangan industri |
| 3 | Pengembangan IKM | Penguatan Kelembagaan IKM | Belum optimalnya penguatan kelembagaan IKM | Upaya pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi yang belum optimal | SDA dan SDM yang belum optimal | Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster. |
|  |  |  |  |  |  | Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan |
|  |  |  |  |  |  | Potensi SDA dan SDM belum dioptimalkan untuk penguatan komoditas unggulan |
|  |  |  |  |  |  | Masih lemahnya kualitas dan upaya menciptakan differensiasi dan diversivikasi produk industri kecil |
|  |  |  |  |  |  | Belum adanya pengelolaan yang baik kepada anggota paguyuban/ asosiasi dari masyarakat |
| BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | |
| 1. | Penurunannilai ekspor | Rendahnya produktivitas dan daya saing produk | Rendahnya kemampuan pengelolaan usaha | Rendahnya kualitas SDM dan pengetahuan SDM tentang tata cara ekspor maupun manfaat ekspor produk | Kondisi persaingan global yang semakin tajan | 1. Masih rendah UKM yang berorientasi ekpor |
| 2. | Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) | Permintaan yang cukup tinggi, sementara barang yang tersedia terbatas | 1.Pendistribusian bahan pokok terganggu oleh arus macet dijalan, dan cuaca yang buruk | 1. Koordinasi dengan pusat dan instansi terkait | 1. Persediaan dan permintaan (supplay and demand) yang dipengaruhi oleh cuaca | Fluktuasi harga pada waktu tertentu |
|  |  |  | 2. Adanya indikasi penimbunan-penimbunan barang oleh spekulan | 2. Sarana distribusi | 2. Kelangkaan bahan pokok yang disebabkan oleh spekulan |  |
| 3. | Turunnya minat konsumen terhadap pasar rakyat | Sarana dan prasarana yang belum memadai | 1. Kondisi fisik pasar | 1. Pasar rakyat terkesan kumuh, bau, kotor, semrawut, dll  2. Perilaku pedagang pasar yang tidak memperdulikan kebersihan di lingkungan pasar, sehingga mempengaruhi kenyamanan berbelanja  3. Pembiaran PKL di lingkungan sekitar pasar yang dapat menyebabkan gangguan terhadap pasar rakyat dan para pedagang didalamnya | 1. Maraknya pembangunan pasar modern  2. Perubahan gaya hidup/perilaku konsumen | Banyak pengunjung beralih ke pasar modern, toserba, dan toko online |
|  |  |  | 2. Tidak adanya jaminan kepastian harga barang di pasar rakyat | 2. Perilaku pedagang pasar yang kurang memahami strategi pemasaran, sehingga lebih mementingkan keuntungan sesaat | 2. Pesatnya informasi akibat perkembangan teknologi informasi memberikan akses kepada konsumen untuk memilih berbelanja dengan cara yang lebih mudah dan murah |  |
| 4. | Penataan PKL | Sarana dan prasarana bagi PKL yang belum memadai | Maraknya PKL yang memadati lingkungan di sekitar pasar rakyat | 1.terbatasnya jumlah bedak dan adanya peluang tumbuhnya PKL karena perilaku konsumen yang enggan masuk ke dalam pasar | 1. Perilaku konsumen  yang enggan berbelanja di dalam pasar | 1. Perlunya penataan dan pengawasan PKL dan pedagang pasar |
| 5. | Kualitas pelayanan publik | Transparansi layanan publik | Beberapa jenis layanan belum optimal | - | 1.Adanya moratorium peraturan perizinan minol  2. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dagang terhadap peraturan | Adanya ketidakpuasan pengguna layanan atas layanan publik yang diberkan |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tentu memiliki visi dan misi dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, menggunakan visi dan misi milik Walikota terpilih. Adapun visi dan misi Walikota Malang adalah:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatunthoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan Visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saingdaerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dandaya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antarumat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransiantar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasidan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi ke-1 yaitu “Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga”. Dan misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.” Kemudian hasil telaah dari misi ke-1 dan ke-2 tersebut terdapat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

| No. | Visi/Misi/ Program Kerja KDH/WKDH | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penghambat | Pendorong |
| 1 | MISI 1:  Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga | Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan pengembangan perdagangan luar negeri meliputi:   1. Pengumpulan dan pengolahan data   dalam rangka perencanaan teknis stabilitas harga dan perlindungan konsumen   1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen | Distribusi yang belum lancar | Pendistribusian bahan pokok terganggu oleh arus macet dijalan, dan cuaca yang buruk | Adanya kerjasama antar pemerintah pusat maupun daerah |
| Kondisi sebagian pasar rakyat yang masih kurang baik | Perilaku pedagang pasar yang tidak memperdulikan kebersihan di lingkungan pasar, sehingga mempengaruhi kenyamanan berbelanja | Revitalisasi pasar dan pemeliharaan pasar rakyat |
| 2 | MISI 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan | Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi | Banyaknya koperasi yang belum memenuhi standar nasional | Kurang baiknya sistem kelembagaan Koperasi | Prioritas pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi |
|  |  |  | Masih banyaknya koperasi yang terancam likuidasi | Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif | Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendorong pengebangan koperasi |
|  |  | Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro | Perkembangan usaha mikro cenderung melambat | Rendahnya SDM, legalitas, kemampuan akses permodalan , kemitraan, serta pendampingan bagi usaha mikro dalam mengembangkan usahanya | Banyaknya fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro |
|  |  |  | Rendahnya ekosistem kolaborasi pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan baru bagi usaha mikro | Banyaknya stake holder yang bergerak pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro |
|  |  |  | Belum optimalnya penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku Usaha Mikro Kecil | Pengembangan penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi berbasis usaha berskala rumahan |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Dan Prasarana Industri, Dan Pemberdayaan Industri | Terbatasnya lahan untuk industri di Kota Malang; | Maraknya pembangunan perumahan dan ruko | Rencana Tata Ruang Wilayah yang secara spesifik menyebutkan perwilayahan industri |
|  |  |  | Rendahnya industri kecil yang memiliki ijin usaha industri; | Persyaratan pengurusan ijin yang sulit dipenuhi industri kecil | Adanya sosialisasi terkait ijin usaha industri, kemudahan pengurusan IUMK, adanya OSS. |
|  |  |  | Lambatnya laju pertumbuhan sektor industri; | Pergeseran kepada sektor tersier/jasa | Prioritas kebijakan pembangunan daerah pada ekonomi kreatif |
|  |  |  | Perkembangan sektor industri cenderung mengalami penurunan dilihat dari indikator turunnya fluktuatif nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor, laju pertumbuhan, kontribusi terhadap PDRB turun | Belum optimalnya manajemen pengelolaan pada sektor industri yang dilakukan | Daya beli masyarakat yang meningkat |
|  |  |  | Lemahnya daya saing IKM terutama menghadapi revolusi industri 4.0 | Lemahnya kompetensi SDM Industri | Dorongan pemerintah dalam peningkatan kompetensi SDM |
|  |  |  | Minimnya industri berwawasan lingkungan. | Terbatasnya pengetahuan pelaku industri terkait wawasan lingkungan | Sosialisasi industri hijau yang makin masif |
|  |  | Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan pengembangan perdagangan luar negeri | Peran UKM terhadap ekspor masih rendah | 1. Kurangnya informasi pasar baik itu negara-negara yang menjadi orientasi pasar produk UKM 2. Desain produk yang belum mengikuti keinginan pasar | Promosi, pembinaan, dan sosialisasi bagi UKM |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perindustrian ataupun Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka telaah dari Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdapat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

| No | Renstra K/L  dan Renstra PD Provinsi | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penghambat | Pendorong |
| BIDANG KOPERASI | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat | merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Organisasi, tata laksana, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang organisasi, tata laksana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia | banyak UMKM yang belum memiliki badan hokum yang jelas | Belum mampu bersaingnya produk UMKM dengan produk yang dihasilkan dari luar daerah Kota Malang | Adanya niat dan motivasi dari pemerintah daerah untuk peningkatan wirausahawan baru |
| 2. | Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi | melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Angaran Dasar Koperasi, serta pembubaran Koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas Koperasi | Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan | Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi | Struktur dan perasiangan ekonomi yang lebih bertumpu pada modal |
| 3. | Meningkatnya Produktifitas Koperasi | melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengawasan usaha Koperasi | Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan Koperasi | Lembaga keuangan formal yang belum optimal memberikan bantuan keuangan / kredit pada UMKM terkendala jaminan | Adanya motivasi dari masyarakat untuk pengembangan koperasi |
| BIDANG USAHA MIKRO | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor- sektor unggulan | Merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Peran serta Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. | UMKM masih terkendala pada masalah akses dan permodalan | Belum mampunya pelaku usaha dalam mengakses modal melalui lembaga keuangan | Mulai tumbuh dan berkembangnya lembaga pinjaman modal di Nasional |
| 2. | Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM | Merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan | kurangnya inovasi produk UMKM | Banyak produk dari luar Kota Malang yang mempengaruhi pasar regional | Banyak potensi produk UMKM yang bida dikembangkan |
| 3. | Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan | merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Usaha dalam rangka pelaksanaan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro | kurangnya tenaga pendamping pada UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan | Masih kurangnya tenaga lapangan untuk pencatatan data pelaku UMKM guna mendapatkan data valid program perlindungan usaha | Banyak nya tenaga SDM yang sudah terverifikasi |
| 4. | Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UM yang ada di sentra | melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UM | Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UM yang kompeten | Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru | Paradigma pembangunan sudah sepenuhnya berorientasi kewirausahaan |
| 5. | Meningkatnya Standarisasi UM dan Produk UM | melaksanakan kebijakan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UM | Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UM (K- UM) | Rendahnya produktivitas | Peningkatan daya saing produk UM |
| BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | |
| 1. | Dokumen Renstra Kementerian Perindustrian | Kementerian Perindustrian | Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan. | Pelaku Industri tidak memiliki keahlian teknologi | Antusiasme pelaku industri dalam mengikuti bimtek |
| Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga dengan dunia industri. | Minimnya kerjasama antara lembaga pengembang iptek dengan industri , khususnya pada RnD | Minat dari pengembang iptek dan pelaku industri dalam kerjasama RnD |
| Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja. | Masih terdapat tenaga kerja industri yang berpendidikan rendah | Terdapat fasilitasi pelatihan tenaga kerja |
| Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. | Lahan pemerintah masif disewakan kepada swasta | Peluang kolaborasi dengan stakeholders dalam menyediakan infrastruktur industri |
| Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya | Terbatasnya SDM dan teknologi dalam penerapan industri hijau | Pengembangan konsep industri hijau oleh pemerintah |
| Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa. | Minimnya kualitas dan kuantitas produk industri | Minat masyarakat terhadap produk lokal cukup baik |
| Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. | Manajemen kelembagaan yang belum optimal | Diterapkannya reformasi birokrasi |
| 2. | Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perdaangan Provinsi Jawa | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Perdagangan Provinsi Jawa | Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri | Pangsa pasar yang terbatas | Perkembangan teknologi dan media yang semakin masif |
|  | Timur | Timur | Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar stakeholders | Kurang maksimalnya collaborative governance | Pengembangan kerjasama antar stakeholders |
|  |  |  | Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk | Manajemen pemasaran yang belum maksimal | Potensi inovasi dan kreativitas SDM |
| BIDANG PERDAGANGAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan JasaPeningkatan | Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor; | Kurangnya informasi dari impotir | Kurang transpraransi pelaku importir dan ekportir | Koordinasi dan sinergi dengan bea cukai dan |
| 2 | Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional | Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif; | Kurangnya peran pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif | Tidak seimbangnya Pelaku usaha dengan fasilitas yang tersedia | Banyaknya pelaku usaha ekonomi kreatif |
| 3 | Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspo | Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor | Kewenangan dilimpahkan ke provinsi berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 | - | - |
| 4 | Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif | Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan | Ada beberapa pasar yang belum layak | Banyaknya Jumlah pasar yang harus direvitalisasi | Meningkatkan Pertumbuhan daerah |
|  |  | Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar | Penarikan Retribusi pelayanan PasarBelum maksimal | Kurangnya Kesadaran Pedagang | * Perda Nomor 3 tahun 2015 * Pelaksanaan E- Retribusi |
| 5 | Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding) | Pelaksanaan promosi produk usaha perdagangan | Strategi branding/media promosi | Kurangnya informasi dan promosi | Banyaknya pelaku UKM di Kota Malang |
| 6 | Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor | Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Fasilitasi kepada calon Ekportir/pelaku usaha |
| 7 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor | Perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Fasilitasi kepada calon Importir |
| 8 | Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan LN di Perbatasan | Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Fasilitasi perdagangan Luar negeri |
| 9 | Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha | Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perdagangan | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Fasilitasi perdagangan Luar negeri |
| 10 | Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan | Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok | Lemahnya monitoring | Sering terjadinya fluktuasi harga | * Melakukan pemantauan secara preodik * Operasi Pasar |
| 11 | Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional | Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok | Kurang maksimalnya monitoring dan pelaporan | Adanya kendala dalam distribusi | Adanya Aplikasi untuk mempermudah akses informasi terkait sembako |
| 12 | Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi | Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar serta pengawasan kegiatan perdagangan | * Banyak timbangan yang belum di tera/tera ulang * Banyaknya konsumen yang konsumtif | * Kurangnya kesadaran pedagang terkait tertib ukur * Kurangnya pemahaman konsumen menjadi konsumen cerdas | Sosialisasi kepada Pedagang dan Konsumen |
| 13 | Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang | Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga | Kurang maksimalnya monitoring dan pelaporan | Adanya kendala dalam pemberian informasi | Aplikasi Sembako Malang.com |
| 14 | Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah | Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga | Kurang maksimalnya monitoring dan pelaporan | Adanya kendala dalam pemberian informasi | Aplikasi Sembako Malang.com |
| 15 | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan | Kurang maksimalnya monitoring dan pelaporan | Adanya kendala dalam pemberian informasi | Aplikasi Sembako Malang.com |
| 16 | Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan | Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Kurangnya Koordinasi antar wilayah | Belum adanya program pembangunan perbatasan | Hubungan kerjasama yang baik antar wilayah |
| 17 | Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa | Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar serta pengawasan kegiatan perdagangan | Kewenangan dilimpahkan ke provinsi berdasarkan uu no 23 tahun 2014 | - | - |
| 18 | Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha | Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen | Belum optimalnya pelaksanaan kemetreologian | Kurangnya tenaga penera | Adanya diklat penera |
| 19 | Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik | Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen | Belum optimalnya pelaksanaan kemetreologian | Kurangnya tenaga penera | Adanya diklat penera |
| 20 | Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan | Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional | Kurangnya SDM yang kompeten | Latar belakang Pendidikan SDM | Pelaksanaan Bimtek |
| 21 | Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih | Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional | Kurang optimalnya melaksanakan SOP | Inkonsistensi dalam menerapkan SOP | Tersedia SOP yang lengkap |
| 22 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal | Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen | Belum optimalnya pelaksanaan kemetreologian | Kurangnya tenaga penera | Adanya diklat penera |
| 23 | Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegras. | Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Belum tersedia  SIM perdagangan | Belum ada program pembuatan SIM perdagangan yang terintegrasi | Tersedianya sarana dan prasaran Penunjang SIM |
| 24 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian | Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Belum ada evaluasi kebijakan terkait | Belum ada program evaluasi | Program kegiatan telah dilaksanakan |
| 25 | Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri | Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor | Kewenangan dilimpahkan ke provinsi berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 | - | - |
| 26 | Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri | Perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Fasilitasi kepada calon Importir |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup-Strategis Pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ditinjau dari implikasi RTRW Kota Malang 2018-2030 dan KLHS Kota Malang 2018-2022. Untuk itu telaah dari RTRW dan KLHS Kota Malang disajikan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

| No | Kebijakan RTRW/KHLS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penghambat | Pendorong |
| BIDANG KOPERASI | | | | | |
| 1 | Lokasi koperasi dan UKM yang tidak sesuai dengan RTRW dan Lingkungan Usaha | Penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantorkas KSP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan | Keterbatasan SDM dalam melaksanakan monev untuk mencocokkan data yang ada di keragaan koperasi dan alamat asli koperasi | Keterbatasan dana koperasi dan ukm dalam memilih lokasi usaha/memproses perijinan usaha | Adanya proses perijinan dan legalitas usaha |
|  |  | lintas daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi |  | Sinergitas antar pelaku usaha koperasi dan UKM belum optimal | Adanya program kemitraan |
| BIDANG USAHA MIKRO | | | | | |
| 1 | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; | Lambatnya laju peningkatan hasil produksi pelaku usaha dari mikro ke kecil disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan bantuan permodalan usaha | belum optimalnya pemanfaatan dan kualitas kajian / analisa sektoral untuk mendukung pelaku usaha dalam mengakses ke layanan keuangan | Adanya upaya meningkatkan pemanfaatan dan kualitas hasil kajian/analisa sektoral terutama analisa terkait data capaian indikator akses UMKM kepada layanan keuangan |
| 2 | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Belum tersedianya data dan informasi base line capaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada KLHS RPJMD yang menjadi tanggunjawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga ada keterbatasan informasi dalam pengambilan kebijakan perencanaan | Belum optimalnya kualitas kajian terhadap indikator SDGs sehingga baseline data dan informasi perencanaan sulit didapatkan | Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas kajian terhadap indikator SDGs sehingga baseline data dan informasi perencanaan mudah di dapatkan |
| BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | |
| I | RTRW |  |  |  |  |
| 1 | Mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada kawasan perbatasan kota | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang | Perkembangan kegiatan industri yang telah terlanjur pada pusat kota, sehingga pelaku industri enggan untuk memindah lokasinya | Minimnya lahan kosong di perbatasan kota | Jumlah sentra industri yang semakin meningkat |
| 2 | Mengarahkan komplek industri dan pergudangan pada perbatasan kota |  | Pergeseran fungsi lahan perbatasan kota menjadi perumahan baru dan lahan PKL Ilegal | Aktivitas pembangunan perumahan baru yang menyasar perbatasan kota sehingga memicu adanya PKL Illegal | Berkembangnya sentra industri yang dapat berkembang di wilayah sempit/perumahan |
| 3 | Mengendalikan intensitas kegiatan industri dan pergudangan pada sub wilayah kota yang telah ada |  | Kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan | Belum maksimalnya manajemen pengendalian kegiatan industri | Dorongan penerapan industri hijau oleh Kementerian Perindustrian |
| 4 | Mengembangkan komplek industri dan pergudangan yang mempertimbangkan aspek ekologis |  | Terdapat penururan kualitas lingkungan hidup di daerah kompleks industri | Penerapan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan masih minim | Sosialisasi kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau |
| 5 | mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi |  | Modal finansial yang terbatas | Dukungan permodalan untuk sentra industri yang masih minim | Mulai berkembangnya Kredit Usaha oleh lembaga keuangan |
| II | KLHS |  |  |  |  |
| 1 | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang | Minimnya investasi untuk Research and Development | Kompetisi global dengan perusahaan manufaktur yang lebih maju | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) |
| 2 | Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur | Maraknya praktik impor | Harga produk impor yang lebih murah | Daya saing produk yang semakin membaik |
| 3 | Proporsi tenaga kerja pada industri manufaktur | Kualitas SDM yang belum maksimal | Tenaga kerja asing yang kompeten | Pelaksanaan pembangunan SDM Industri |
| 4 | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap toltal nilai tambah industri | Kenaikan permintaan produk yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi | Bahan baku produk yang terbatas | Potensi pengembangan kemitraan bahan baku |
| 5 | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit | Permodalan IKM yang lemah | Daya serap IKM teradap kredit masih rendah | Turunnya tarif PPh bagi pelaku IKM |
| 6 | Jumlah perusahaan yang menerapkan serifikasi SNI, ISO 14001 | Minimnya SDM industri yang berkompeten | Besarnya biaya sertifikasi kompetensi | Upaya fasilitasi sertifikasi oleh instansi terkait |
| 7 | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister | Tren pasar global yang mengarah pada produk ramah lingkungan | Dukungan modal dan riset yang masih minim | Penerapan standar industri hijau |
| BIDANG PERDAGANGAN | | | | | |
| 1 | Kebijakan Pembangunan Pasar Baru di wilayah pemekaran kecamatan kedungkandang | Pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat | * Realisasi pelaksanan Pemekaran * Penentuan Lokasi pasar di wilayah pemekaran | Belum adanya kajian terhadap pemekaran wilayah | Tersedianya pasar rakyat di wilayah kecamatan Kedungkan-dang |
| 2 | Menyediakan kawasan komersil yang nyaman, aman, dan produktif untuk berbagai macam pola pengembangan yang diinginkan masyarakat; | Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif; | Belum tersedia renca induk terkait kawasan dengan pola pengembangan bidang perdaganan dan ekonomi kreatif | Sinergitas antar urusasan | Tersedianya rencana kawasan komersil dan produktif |
|  |  | Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif; | Belum optimalnya program terkait bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Belum integrasinya program kegaiatn | Tersedianya ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang |
| 3 | Membatasi kegiatan yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. | Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Kurangnya pelaksanaan pendektesiandini terhadap persoalan perdagangan | Belum adanya data dan akses terhadap informasi perdagangan | Tersedianya ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang |
|  |  | Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Sinergitas antar lembaga | Kurang maksimalnya fasilitasi | Tersedianya ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang |
|  |  | Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif | Belumm optimalnya proteksi terhadap produk perdagangan | Belum adanya data dan akses terhadap informasi perdagangan | Tersedianya ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik isu strategis di tingkat internasional, nasional maupun regional.

* + 1. Isu Internasional
  1. *Sustainable Development Goals*

Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Ditetapkannya arah pembangunan universal yang terangkum dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang membawa prinsip keseimbangan people, planet, prosperity, peace, dan partenrship. SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. *Sustainable Development Goals*  secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran yang menjadi acuan pembangunan di setiap negara di dunia. Adapun tujuan dari SDGs meliputi isu seputar Kemiskinan (*Poverty*), Pangan (*Food*) , Kesehatan (*Health*), Pendidikan (*Education*), Perempuan (*Women*), Air (*Water*) Energi (*Energy*), Ekonomi (*Economy*), Infrastruktur *(Infrastructure*), Ketidaksetaraan (*Inequality*), Pemukiman (*Habitation*), Konsumsi (*Consumption*) , Iklim (*Climate*), Ekosistem Kelautan (*Marine Ecosistem*), Ekosistem (*Ecosistem*), Kelembagaan (*Institutions*), dan Keberlanjutan (*Sustainability*) (Timorria, 2018).

* 1. Gejolak Perekonomian Global

Beberapa perkembangan baru Kondisi perekonomian global hingga tahun 2018 dan 2019 yang dapat memengaruhi ekonomi domestik secara signifikan sebagai berikut:

* + - 1. Tren di antara bank sentral utama, terutama Amerika Serikat, Eurozone, Inggris, dan mungkin Jepang, untuk mulai mengetatkan kembali kebijakan moneternya. Hal ini mungkin telah lama diprediksi oleh pasar, terutama melihat respons pasar keuangan global yang tidak terlalu bereaksi negatif terhadap kebijakan tersebuts. Respons yang cukup tenang ini disebabkan oleh dua faktor; pertama, adanya komunikasi kebijakan moneter dan upaya bank sentral yang lebih baik dan menghindar kejutan membuat investor mampu mengantisipasi tingkat suku bunga terlebih dahulu. Kedua, terdapat peningkatan perilaku mengambil risiko dan toleransi risiko di antara pelaku pasar. Diperkirakan pola tersebut akan berlanjut hingga 2018 dan 2019, yang akan melanjutkan tren arus modal masuk yang lebih banyak ke pasar negara berkembang, termasuk di Indonesia, meskipun memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
      2. Kondisi Perekonomian Global yang fluktuatif akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dan China sehingga meyebabkan lambatya pergerakan ekonomi global dan bergejolaknya pasar keuangan global. Hal tersebut telah memberikan dampak terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang Indonesia.

Pentingnya kemitraan dagang antara Indonesia dan Amerika dapat dilihat melalui share ekspor yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Trade Map dan CEIC, share ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam meningkat dari tahun ke tahun, yakni pada tahun 2014 sebesar 9,4 persen, pada tahun 2015 sebesar 10,9 persen, pada tahun 2016 sebesar 11,3 persen dan pada tahun 2017 sebesar 10,6 persen (Putera, 2018). Tak kalah pentingnya dengan kemitraan Indonesia dan Amerika, kondisi kemitraan pada share ekspor antara Indonesia dan China juga memberikan dampak perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Share ekspor ke China tahun 2014 sebesar 10 persen, tahun 2015 sebesar 10,1 persen, tahun 2016 sebesar 11,2 persen, dan tahun 2017 sebesar 13,2 persen (Putera, 2018).Berdasarkan data tersebut, maka kondisi perekonomian kedua negara tersebut akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap Indonesia. Ketika kedua negara tersebut mengalami perlambatan pada pertumbuhan ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan menurun. Dalam menyikapi resiko tersebut, sudah semestinya Indonesia perlu membuat langkah-langkah strategik yang dapat mengantisipasi jika perang dagang tersebut terjadi secara berkelanjutan.

* 1. Globalisasi telah melahirkan era Industri 4.0 menjadi kekuatan industri kreatif masa depan. Industri 4.0 diperkenalkan sejak 2011 di Jerman yang juga menjadi momentum penerapan ekonomi digital. Keberlangsungan industri kreatif masa depan ditentukan oleh kemampuan mengelola dan mengembangkan teknologi, seperti big data, artificial intelligence (AI), cloud computing, internet of things (IoT), robots, drones, 3D Printing, Blockchain, Virtual Reality (VR), dan Augmented Reality (AR). Penerapan Industri 4.0, diharapkan memberikan dampak terhadap proses produksi manufaktur menjadi semakin efisien sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing.

Menyikapi era Industri 4.0 yang telah berlangsung, pemerintah Indonesia telah menyusun roadmap industri 4.0.Dengan adanya roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia di 2030 (Rachman, 2018).Roadmap industri tersebut diluncurkan dengan judul “Making Indonesia 4.0” oleh Presiden Joko Widodo awal April 2018 lalu sebagai peta jalan dan strategi Indonesia dalam memasuki era digital yang tengah berjalan. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya implementasi Industri 4.0 ini, Indonesia dapat mencapai Top Ten (10 besar) ekonomi global pada tahun 2030 melalui peningkatan angka ekspor netto kita kembalikan sebesar 10 persen dari PDB (Kompas, 2018). Kemunculan “Making Indonesia 4.0” diyakini dapat merevitalisasi sektor industri manufaktur agar lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

* + 1. Isu Nasional

1. Perihal efisiensi pasar tenaga kerja dan kesiapan teknologi, pemerintah telah menegaskan untuk terus menyoroti kedua hal tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Selama ini efisiensi pasar tenaga kerja dan kesiapan teknologi erat kaitannya dalam nilai indeks daya saing Indonesia. Indeks Daya Saing Indonesia (36) yang masih rendah dibawah Singapura (3), Malaysia (23), dan Thailand (32). Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (96) dan Kesiapan teknologi (80) menjadi salah satu faktor rendahnya daya saing Indonesia.
2. Kinerja investasi tahun 2017 yang memberi angin segar pada Indonesia turut berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penyerapan tenaga kerja pada kuartal III/2017 mencapai 286.497 orang, naik 3,79% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2016 yaitu 276.023 orang. Perlu dicermati bahwa pertumbuhan ini terjadi setelah pada periode yang sama tahun 2016 terkontraksi 26,11%. Bila melihat kinerja gabungan 9 bulan, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 825.954 orang, justru terkontraksi 13,78% dibandingkan dengan tenaga kerja pada 2016 sebanyak 957.932 orang. Menilik data tersebut, maka masalah klasik tentang jumlah serapan tenaga kerja belum maksimal terjadi sekalipun iklim investasi telah mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya dengan melakukan *link and match* dengan kebutuhan industri (Wicaksono dan Mola, 2017).

Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi digital yang semakin masif turut berdampak pada upaya efisiensi.Hal ini sejatinya tidak terlalu bermasalah jika Indonesia tidak memiliki problematika seperti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.Akan tetapi perhatian khusus memang perlu diberikan pada isu kesiapan teknologi, karena arus digitalisasi yang semakin berkembang dan tak bisa ditolak.Fenomena arus digitalisasi tak bisa dipungkiri telah member dampak positif terhadap industri maupun perdagangan. Melalui perkembangan teknologi digital, karir di bidang ekonomi kreatif meningkat dan menyebar luas di masyarakat. Masyarakat perlu adaptif terhadap kecepatan perkembangan teknologi digital, harapannya adalah agar masyarakat dapat memiliki daya saing di kancah global. Terutama pada manusia di sektor industri, perlu meningkatkan kesiapan teknologinya. Hal tersebut penting untuk menghindari kegagapan terhadap teknologi yang akan menciptakan masalah-masalah baru di tengah perkembangan industri.

1. Indeks Inovasi Global Indonesia (80) masih rendah dibawah Singapura (5), Malaysia (35), Thailand (44), Brunei Darussalam (67), dan Filipina (73). Rendahnya indek inovasi terlihat dari lingkungan regulasi yang birokratis, lingkungan politik, *human capital capacity*, dan *knowladge creation*. Sebuah negara membutuhkan inovasi agar mampu menumbuhkan perekonomiannya. Sehingga inovasi wajib dimudahkan dan membutuhkan fasilitasi dari pemerintah agar terus tumbuh di masyarakatnya. Kemudahan dalam mengimplementasikan suatu inovasi tidak terlepas dari sebuah regulasi yang mengaturnya. Oleh karenanya, regulasi yang birokratis akan membuat inovasi sulit untuk diimplementasikan. Sedangkan lingkungan politik berpengaruh terhadap performa inovasi di Indonesia. Akomodasi inovasi perlu dilakukan dengan baik oleh para pejabat politik agar mampu menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Kebijakan yang diterapkan sejatinya harus berpihak dan mendorong pada performa inovasi anak bangsa agar semakin baik.

Inovasi juga berkaitan langsung dengan *human capital capacity*. Indonesia memiliki kekayaan modal social maupun modal capital untuk meningkatkan kualitas inovasi ditingkat global. Sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan bagaimana mekanisme untuk memanfaatkan modal social maupun modal capital ini untuk mendongkrak performa pelaku pelaku industri, termasuk didalamnya skala mikro, kecil, maupun menengah (UMKM), untuk tampil lebih inovatif (Yulianto, 2016).  Rendahnya daya inovasi Indonesia terutama disebabkan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan (*Research and Development*/R&D) inovasi dan teknologi sangat rendah. Pada 2015, anggaran R&D Indonesia baru 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan di negara lain, seperti Korea Selatan sudah mencapai 4,0 persen, Jepang 3,4 persen, bahkan Singapura sekitar 2,6 persen dari PDB (Koran Jakarta, 2017). Selain itu rendahnya *knowladge creation* juga perlu diantisipasi. Kreasi merupakan satu kesatuan dari terciptanya inovasi. Untuk memajukan kreasi maka dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni.Inovasi menjadi salah satu syarat untuk sebuah negara dapat semakin maju.Untuk itu performa inovasi masyarakat harus selalu ditingkatkan.

1. Peringkat *Easy to doing Business* (EoDB) Indonesia berada di urutan 72, masih dibawah Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), dan Vietnam (68). Kemudahan dalam *Starting a business* menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia. Sejak tahun 2015 peringkat EoDB Indonesia terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 peringkat EoDB Indonesia berada di urutan 72. Sayangnya pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi peringkat 73. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab turunnya peringkat EoDB Indonesia. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus pemerintah untuk mendorong sejak tahun 2017 mulai melemah. Semangat yang ditunjukkan dalam mereformasi tak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir reformasi dunia bisnis hanya sekedar menyederhanakan aturan bukan melakukan perubahan yang radikal (Uly, 2018).

Penghitungan kemudahan berbisnis Indonesia sendiri diambil sampel dari dua kota besar yakni Jakarta dan Surabaya. Adapun porsi penilainya adalah Jakarta sebesar 78% dan Surabaya 22%.Dari sempel tersebut, ada 10 indikator yang menjadi penilaian kemudahan berusaha. 10 indikator tersebut adalah:

1. Memulai Usaha;
2. Perizinan terkait Mendirikan Bangunan;
3. Penyambungan Listrik;
4. Pendaftaran Properti;
5. Akses Perkreditan;
6. Perlindungan terhadap Investor Minoritas;
7. Pembayaran Pajak;
8. Perdagangan Lintas Negara;
9. Penegakan Kontrak; dan
10. Penyelesaian Perkara Kepailitan

Adapun yang membuat peringkat EoDB Indonesia turun ada empat indikator. Indikator pertama adalah turunnya peringkat *dealing with construction permit* (perizinan untuk membangun gudang) dari menjadi 112.Selanjutnya adalah protective minority invetsor (perlindungan terhadap investor) yang juga turun dari peringkat 43 menuju ke peringkat 51. Kemudian ada *trading acros Borders* (efesiensi perdagangan ekspor impor) yang turun peringkat dari 112 ke 116. Dan terakhir adalah enforcement contract (penegakan kontrak) yang turun dari peringkat 145 menjual 146. Sementara itu, enam indikator yang mencatatkan kenaikan peringkat adalah starting a business (memulai usaha) yang naik dari peringkat 144 ke 134.Kemudian ada regsitering properti (pendaftaran properti) yang naik dari peringkat 106 ke 100. Lalu ada *getting credits* (mendapatkan kredit) yang naik dari peringkat 55 ke 44. Kemudian ada *resloving insolvency* (penyelesaian kepailitan) yang meningkat dari 38 ke 36 (Hartomo, 2018).

1. Amanat peraturan perundangan terkait Pembangunan Industri (Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2015 tentang RIPIN) hingga Perpres No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
   * 1. Isu Regional
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 5,61 persen. Capaian tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkisar 5,5 persen. Kondisi ini menunjukkan, Kota Malang mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada skala regional jawa timur maupun skala nasional (Choirul, 2017). Penyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar berasal dari perdagangan dan industri. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Komposisi sektor ekonomi Kota Malang pada 2016 didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,55 persen, dan sektor industri pengolahan 28,92 persen. Adapun sektor konstruksi memiliki komposisi sebesar 12,92 persen; sektor jasa pendidikan (8,13 persen); sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (4,90 persen), sektor informasi dan komunikasi (3,99 persen), serta sektor lain-lain (11,95 persen) (Syaiful, 2018). Berdasarkan hal tersebut, peran IKM kini telah menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diupayakan dengan prioritas pengembangan IKM, agar tidak hanya berkonstribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga peningkatan iklim investasi dan konstribusi terhadap PDRB.
3. Keberadaan koperasi sebagai lembaga penunjang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting. Akan tetapi kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha untuk berkoperasi masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif.
4. Keberadaan industri yang berkaitan dengan peranannya sebagai sektor pemimpin (*leading sektor*), yaitu pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, maupun jasa (Arsyad, 1999 dalam Oktarinda, 2007). Berkembangnya sektor tersebut tentu akan membuka peluang naiknya laju pertumbuhan industri, sehingga menyebabkan peluang pekerjaan yang meluas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan sektor industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri, penciptaan industri padat karya, dan industri padat teknologi sehingga berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penganguran.
5. Terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor sekunder (industri) ke sektor tersier (perdagangan/jasa) menempatkan sektor perdagangan sebagai penyumbang tertinggi PDRB Kota Malang sebesar 29,91%. Sayangnya tingginya potensi ini tidak didukung daya saing produk lokal, artinya perdagangan di Kota Malang masih didominasi produk dari luar daerah maupun luar negeri. Daya saing produk lokal harus terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan usaha mikro dan industri kecil menengah yang didukung oleh optimalisasi akses pasar dalam maupun luar negeri, peningkatan penggunaan produk dalam daerah untuk mendorong pengembangan perdagangan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor koperasi, industri dan perdagangan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan tujuan dan sasaran.

Tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Diperlukan tujuan untuk menyempurnakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023. Tujuan yang diterapkan merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tahun 2018-2023. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Tujuan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

* + - 1. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
      2. Meningkatnya pertumbuha ekonomi kreatif
  1. Sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 2018-2023. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja  Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal  Kinerja | | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| BIDANG KOPERASI | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro | Persentase koperasi sehat | - | 5,14% | 10,15% | 40,10% | 70,05% | 100% | 129,70% | 129,70% |
|  |  |
| BIDANG USAHA MIKRO | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan usaha kecil | - | 7,90% | 11,22% | 40,79% | 70,39% | 99,99% | 129,58% | 129,58% |
| BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri | Pertumbuhan Industri | 1.95 | 3.67 | 3,70 | 3,88 | 4,15 | 4,41 | 4,67 | 4,67 |
| BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok | Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas pasar | Persentase pasar halal | - | 0% | 0% | 8% | 11,54% | 15,38% | 19,23% | 19,23% |
| PELAYANAN KESEKRETARIATAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya Kinerja pelayanan perangkat Daerah | Nilai SAKIP | - | - | 80,50 | 80,67 | 80,90 | 81,00 | 81,20 | 81,20 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk meminimalisir ancaman dalam pencapaian tujuan. Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, diperlukan analisis SWOT agar strategi dan arah kebijakan sejalan dengan isu-isu strategis yang ada. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi (Rangkuti, 2004:18). Analisis SWOT yang dimaksud adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internal/Eksternal | | No | Kekuatan (Strengths) | No | Kelemahan (Weaknesess) |
|  | | 1 | Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pembina Koperasi dan UM yang cukup | 1 | Profesionalisme aparatur Pembina tidak sama |
| Sasaran 1 | | 2 | Komitmen dan kebijakan terkait perberdayaan KUKM sangat kuat (Permenkop UKM No.14 tahun 2018 tentang Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) | 2 | Masih rendahnya kewirausahaan dan kompetensi SDM KUKM |
| Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | | 3 | Mudahnya proses pendirian koperasi | 3 | Kesenjangan penguasaan dan pemanfaatan terkait sistem informasi dan teknologi di kalangan KUKM |
|  | | 4 | Adanya sasaran binaan Koperasi dan UM di Kota Malang | 4 | Terbatasnya plafon anggaran yang berimbas kepada minimnya jumlah sasaran binaan Koperasi dan UM yang mendapatkan akses pelayanan, fasilitasi dan pembinaan |
|  | |  |  | 5 | Keterbatasan jejaring usaha dan pemasaran KUKM |
| No | Peluang (Opportunities) | No | Kekuatan dan Peluang (SO) | No | Kelemahan dan Peluang (WO) |
|
| 1 | Perundang-undangan untuk Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil menengah yang memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha | 1 | Meningkatkan potensi keberlanjutan pelaku usaha mikro dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan daya saing di era pasar global sehingga nilai produksinya semain baik | 1 | Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat pelaku usaha mikro |
|
| 2 | Alokasi pembiayaan dari Pusat maupun daerah terkait peningkatan pemberdayaan KUKM |  |  | 2 | Meningkatkan penguasaan sistem informasi,riset, dan teknologi di sektor industri |
| 3 | Potensi kerjasama antar stakeholders yang baik |  |  | 3 | Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD |
| No | Ancaman (Threats) | No | Ancaman dan Kekuatan (ST) | No | Kelemahan dan Ancaman (WT) |
|
| 1 | Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi serta tuntutan daya saing global | 1 | Mengembangkan pemetaan kebutuhan akan fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan peningkatan mutu produk KUKM | 1 | Berdirinya lembaga keuangan lain yang mengancam keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2 | Tidak meratanya respon pengurus koperasi terhadap program-program inovatif | 2 | Peningkatan kualitas sistem informasi bagi kebutuhan PK2UKM (Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM) | 2 | Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing KUKM |
| 3 | Peran stakeholder dalam peningkatan dan pemberdayaan KUKM yang belum terakomodir | 3 | Meningkatkan peran kemitraan dari perbankan, pasar modern dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya KUKM yang unggul dan berdaya saing tinggi |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran 2  Meningkatnya kualitas pasar | | | No. | KEKUATAN (STRENGTH) | No. | | KELEMAHAN (WEAKNESS) | |
| 1. | Meningkatnya persentase pasar rakyat yang direvitalisasi | 1. | | Terdapat beberapa pasar yang masih terkendala dalam proses revitalisasinya, sehingga kondisi pasar belum baik. | |
| 2. | Adanya pasar yang sudah memiliki sertifikat SNI | 2. | | Perilaku pedagang yang masih belum taat pada peraturan | |
| 3. | Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk pemeliharaan dan revitalisasi pasar rakyat | 3. | | Kurangnya aparatur untuk melaksanakan pengawasan maupun penegakan peraturan daerah di bidang pasar rakyat | |
|  | | |  |  | 4. | | Keterbatasan kemampuan pedagang pasar dalam hal manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit untuk bersaing dengan pasar modern | |
| No. | | PELUANG (OPORTUNITY) | No. | Kekuatan dan Peluang SO | No. | | Kelemahan dan Peluang WO | |
| 1 | | Pasar rakyat dapat didorong menjadi tujuan wisata berbasis kearifan budaya lokal | 1 | Meningkatkan kualitas pasar hingga menuju pasar halal untuk meningkatkan jumlah pengunjung/konsumen | 1 | | Menyelesaikan kendala dalam rehabilitasi/revitalisasi pasar, sehingga tidak ada lagi pasar rakyat yang kondisinya tidak baik | |
| 2 | | Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan transaksi pembayaran maupun jual beli di pasar rakyat | 2 | Melakukan pembinaan kepada pedagang pasar untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya | 2 | | Meningkatkan pengetahuan dan ketaatan pedagang pasar terhadap peraturan melalui sosialisasi maupun sekolah pasar | |
|  | |  | 3 | Memberikan fasilitasi teknolgi informasi bagi pedagang pasar | 3. | | Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan pasar terhadap peraturan daerah yang harus ditegakkan | |
| No. | | ANCAMAN (THREAT) | No. | Kekuatan dan Ancaman ST | No. | | Kelemahan dan Ancaman WT | |
| 1 | | Perubahan perilaku konsumen yang cenderung memilih pasar modern karena kemudahan akses maupun kenyamanan dalam berbelanja | 1 | Meningkatkan budaya berbelanja ke pasar rakyat melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun promosi kepada masyrakat. | 1 | | Peningkatan kualitas pasar rakyat | |
| 2 | | Meningkatnya pasar online dapat menimbulkan penurunan jumlah konsumen pasar rakyat | 2 | Melakukan pembinaan pemasaran online bagi pedagang pasar |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| Sasaran 3  Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok | | | No. | KEKUATAN (STRENGTH) | No. | | KELEMAHAN (WEAKNESS) | |
| 1 | Keberadaan UPT metrologi legal yang bertugas menjamin perlindungan ketepatan UTTP bagi konsumen | 1 | | Kesadaran pelaku pemilik UTTP untuk melakukan tera/tera ulang masih cukup rendah | |
| 2 | Adanya kegiatan operasi pasar saat terjadi lonjakan kenaikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya | 2 | | Rendahnya pemahaman konsumen maupun pelaku usaha terhadap peraturan terkait perlindungan konsumen | |
| 3 | Adanya pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya secara kontinyu | 3 | | Kurangnya data kebutuhan dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya | |
| 4 | Kerjasama dengan BULOG dan distributor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dannbarang penting lainnya |  | |  | |
| No. | | PELUANG (OPORTUNITY) | No. | Kekuatan dan Peluang SO | No. | | Kelemahan dan Peluang WO | |
| 1 | | Indeks daya beli konsumen terhadap produk pangan cukup tinggi | 1 | Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui kegiatan-kegiatan tertib ukur, peningkatan pengetahuan konsumen dan pedagang atas hak dan kewajibannya | 1 | | Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen dan pedagang terhadap peraturan perlindungan konsumen | |
| 2 | | Inflasi Kota Malang cukup rendah dan terkendali | 2 | Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menjada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya | 2 | | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data terkait bahan pokok dan barang penting lainnya | |
| No. | | ANCAMAN (THREAT) | No. | Kekuatan dan Ancaman ST | No. | | Kelemahan dan Ancaman WT | |
| 1 | | Masih banyaknya spekulan yang mengambil manfaat atas lonjakan permintaan maupun rendahnya ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya, sehingga menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya pada waktu-waktu tertentu. | 1 | Meningkatkan pemantauan dan pegawasan terhadap distributor bahan pokok dan barang penting lainnya | 1 | | Meningkatkan ketersediaan data supplier/distributor | |
| 2 | | Kondisi perekonomian global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya | 2 | Meningkatkan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan pokok dan barang penting lainnya guna menjaga kemandirian dan ketahanan daerah. | 2 | | Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap supplier/distributor | |
| 3 | | Tingginya ketergantungan terhadap beberapa komoditas impor |
| Internal/Eksternal  Sasaran 4  Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri | | | No | Kekuatan (Strengths) | | No | | Kelemahan (Weaknesess) | |
| 1 | Jumlah aparatur telah mencukupi | | 1 | | Tingkat pemahaman tiap aparatur dalam menyikapi isu bervariasi | |
| 2 | Tingkat pendidikan aparatur yang mayoritas S1 dan S2 | | 2 | | Lemahnya kompetensi SDM Industri | |
| 3 | Kinerja aparatur yang melampaui target di tahun sebelumnya | | 3 | | Minimnya IKM yang menerapkan industri hijau | |
|  | | | 4 | Pelatihan yang dilakukan telah bersifat berkelanjutan | | 4 | | Minimnya kualitas dan kuantitas produk | |
| 5 | Antusias SDM Industri yang tinggi dalam mengikuti program Disperin | | 5 | | Manajemen kelembagaan yang belum optimal | |
|  |  | | 6 | | Kurang maksimalnya collaborative governance | |
|  |  | | 7 | | Manajemen pemasaran yang belum maksimal | |
| No | Peluang (Opportunities) | | No | Kekuatan dan Peluang (SO) | | No | | Kelemahan dan Peluang (WO) | |
|
| 1 | Terbukanya peluang kerja sama dengan stakeholders | | 1 | Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan. | | 1 | | Mendorong IKM untuk tertib dalam penerapan industri hijau | |
| 2 | Daya beli masyarakat yang meningkat | | 2 | Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan | | 2 | | Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran; | |
| 3 | Bantuan pemasaran dari pemerintah | |  |  | |  | |  | |
| 4 | Potensi inovasi dan kreativitas SDM Industri | |  |  | |  | |  | |
| 5 | Minat masyarakat terhadap produk lokal yang cukup tinggi | |  |  | |  | |  | |
| 6 | Munculnya kebijakan terkait industri hijau | |  |  | |  | |  | |
| No | Ancaman (Threats) | | No | Ancaman dan Kekuatan (ST) | | No | | Kelemahan dan Ancaman (WT) | |
|
| 1 | Tenaga kerja asing yang lebih kompeten | | 1 | Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri | | 1 | | Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi | |
| 2 | Pemasaran produk impor yang lebih luas | |  |  | | 2 | | Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau | |
| 3 | Produk impor yang lebih murah dan berkualitas | |  |  | | 3 | | Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri | |
| 4 | Pencemaran lingkungan akibat industri | |  |  | | 4 | | Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga riset | |
| 5 | Indeks Inovasi Global Indonesia (80) Rendahnya indek inovasi terlihat dari linkungan regulasi yang birokratis, lingkungan politik, human capital capasity, dan knowladge creation. | |  |  | | 5 | | Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM | |
| 6 | Peringkat *easy to doing business* Indonesia berada di urutan 72. Kemudahan dalam Starting a business menjadi salah satu tantangan terbesar Indonesia. | |  |  | |  | |  | |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 5.2  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | | | | | | | | |
| VISI | Kota Malang Bermartabat | | | | | | | |
| MISI 1 | Terwujudnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Layanan Dasar Lainnya | | | | | | | |
| MISI 2 | Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
| Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok | Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat | Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar keagamaan | 1. Pelaksanaan operasi pasar di pasar-pasar rakyat dan di kelurahan  2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga | 1. Pelaksanaan operasi pasar dan bekerjasama dengan pihak ketiga  2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga | 1. Pelaksanaan operasi pasar di pasar-pasar rakyat dan di kelurahan  2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga | 1. Pelaksanaan operasi pasar dan bekerjasama dengan pihak ketiga  2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga  3. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga | 1. Pelaksanaan operasi pasar dan bekerjasama dengan pihak ketiga  2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga  3. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga |
|  |  |  | Pelaksanaan monitoring barang pokok dan strategis di Kota Malang | 1. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | 1. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | 1. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | 1. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | 1. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  | 2. Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya  3. Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2. Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya  3. Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2. Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya  3. Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2. Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya  3. Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2. Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya  3. Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya |
|  |  | Peningkatan tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapan-nya (UTTP) | Jumlah UTTP bertanda tera sah | 1. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang  2. Melaksanakan tera/tera ulang di dalam dan diluar kantor  3. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang bertanda sah sebanyak 20.520 UTTP | 1. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang  2. Melaksanakan tera/tera ulang di dalam dan diluar kantor  3. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang bertanda sah sebanyak 24.624 UTTP | 1. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang  2. Melaksanakan tera/tera ulang di dalam dan diluar kantor  3. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang bertanda sah sebanyak 29.459 UTTP | 1. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang  2. Melaksanakan tera/tera ulang di dalam dan diluar kantor  3. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang bertanda sah sebanyak 35.458 UTTP | 1. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang  2. Melaksanakan tera/tera ulang di dalam dan diluar kantor  3. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang bertanda sah sebanyak 42.550 UTTP |
|  |  |  | Melaksanakan penyuluhan kemetrologian | 1. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian ke kelurahan | 1. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian ke kelurahan  2. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan | 1. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian ke kelurahan  2. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan | 1. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian ke kelurahan  2. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan | 1. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian ke kelurahan  2. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  |  | mengundang SPBU di Kota Malang | mengundang SPBU di Kota Malang  3. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan mengundang pedagang pasar yang memiliki alat UTTP | mengundang SPBU di Kota Malang  3. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan mengundang pedagang pasar yang memiliki alat UTTP  4. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan mengundang pemilik toko modern yang memiliki alat UTTP | mengundang SPBU di Kota Malang  3. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan mengundang pedagang pasar yang memiliki alat UTTP  4. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dengan mengundang pemilik toko modern yang memiliki alat UTTP  5. Pelaksanaan Penyuluhan kemetrologian dengan mengundang perusahaan dan laboratorium yang memiliki |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya Kualitas koperasi dan usaha mikro | Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan | Pemantapan industri kreatif masyarakat | 1. Bimtek Pemasaran produk UM secara online  2.Temu Bisnis bagi pelaku UM | 1. Fasilitasi pemberdayaan UM menuju ekonomi kreatif melalui klinik bisnis | 1. Fasilitasi pemberdayaan UM menuju ekonomi kreatif melalui klinik bisnis | 1. Fasilitasi pemberdayaan UM menuju ekonomi kreatif melalui klinik bisnis | 1. Fasilitasi pemberdayaan UM menuju ekonomi kreatif melalui klinik bisnis |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  | pasar, pariwisata dan UM |  | 3.Forum Komunikasi para pakar bagi pelaku UM  4.penyusunan database UM  5. Fasilitasi Klinik Bisnis  6.Sosialisasi perijinan penerapan standarisasi dan sertifikasi serta penguatan perlindungan bagi Usaha Mikro  7.Pengembangan jaringan pemasaran produk bagi UM | 2.Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro  3.Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro  4.Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM  5. Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  6. Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro  7. Penyusunan Database Usaha Mikro | 2.Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro  3.Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro  4.Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM  5. Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  6. Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro  7. Penyusunan Database Usaha Mikro | 2.Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro  3.Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro  4.Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM  5. Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  6. Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro  7. Penyusunan Database Usaha Mikro | 2.Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro  3.Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro  4.Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM  5. Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  6. Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro  7. Penyusunan Database Usaha Mikro |
|  |  | Menciptakan sistem pengawasan dan pemberdayaan | Meningkatkan jumlah koperasi sehat melalui sistem pengawasan | * + - 1. Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi | * + - 1. Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi | * + - 1. Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi | * + - 1. Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi | * + - 1. Pemeriksaan dan penguatan administrasi koperasi |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  | pemberdayaan koperasi yang lebih partisipatif dan koordinatif | koperasi yang terpadu | * + - 1. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP       2. Bimtek menejemen pengawas koperasi       3. Pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi | * + - 1. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP       2. Bimtek menejemen pengawas koperasi       3. Pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi | * + - 1. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP       2. Bimtek menejemen pengawas koperasi       3. Pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi | * + - 1. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP       2. Bimtek menejemen pengawas koperasi       3. Pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi | * + - 1. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP       2. Bimtek menejemen pengawas koperasi       3. Pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi |
|  |  |  | Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi melalui bimtek perkoperasian | 1. Bimtek Pelaksanaan Rapat anggota koperasi  2. Bimtek SOP dan SOM Simpan Pinjam Koperasi  3. Bimtek Akutansi SP Sektor Riil dan Lap.Keu SAKETAP  4. Bimtek koperasi syariah dan perhitungan pajak  5. Peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah melalui bimtek SKKNI | 1. Bimbingan Teknis manajemen pengawas koperasi  2. Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi  3. Bimtek Menejemen Koperasi | 1.Sosialisasi pembentukan koperasi sariah  2. Bimtek Menejemen Koperasi  3. Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | 1.Sosialisasi pembentukan koperasi sariah  2. Bimtek Menejemen Koperasi  3. Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | 1.Sosialisasi pembentukan koperasi sariah  2. Bimtek Menejemen Koperasi  3. Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  | Meningkatkan jumlah keanggotaan koperasi melalui pengembangan usaha masyarakat | 1. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi  2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat  3. Sarasehan peringatan hari koperasi  4. Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | 1. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi  2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat  3. Sarasehan peringatan hari koperasi  4. Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | 1. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi  2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat  3. Sarasehan peringatan hari koperasi  4. Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | 1. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi  2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat  3. Sarasehan peringatan hari koperasi  4. Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | 1. Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi  2. Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat  3. Sarasehan peringatan hari koperasi  4. Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi |
|  |  | menciptakan sistem Inovasi pelayanan yang efektif dan efisien | optimalisasi peningkatan kualitas layanan koperasi dan usaha mikro | 1. Fasilitasi Klinik bisnis | 1.Fasilitasi Klinik Koperasi di 5 kecamatan  2.Fasilitasi klinik bisnis di 5 kecamatan  3. Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi | 1. Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan  2. Fasilitasi Permasalahan Permodalan  3. Fasilitasi Klinik Koperasi | 1. Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan  2. Fasilitasi Permasalahan Permodalan  3. Fasilitasi Klinik Koperasi | 1. Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan  2. Fasilitasi Permasalahan Permodalan  3. Fasilitasi Klinik Koperasi |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  |  | Pameran Produk Unggulan Koperasi | 4. Monitoring dan Evaluasi  5. Fasilitasi Klinik bisnis | 4. Monitoring dan Evaluasi  5. Fasilitasi Klinik bisnis | 4. Monitoring dan Evaluasi |
|  | Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri | Meningkatnya kinerja sektor industri | Mendorong pembangunan sarana prasarana penunjang nilai produksi IKM yang tepat sasaran | 1. Meningkatkan potensi keberlanjutan IKM dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan indeks inovasi pelaku IKM agar nilai produksinya semain baik.  2. Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat.  3. Mengembangkan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana IKM.  4. Mengupayakan perawatan dan perlindungan | 1. Meningkatkan potensi keberlanjutan IKM dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan indeks inovasi pelaku IKM agar nilai produksinya semain baik.  2. Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat.  3. Mengembangkan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana IKM. | 1. Meningkatkan potensi keberlanjutan IKM dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan indeks inovasi pelaku IKM agar nilai produksinya semain baik.  2. Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat.  3. Mengembangkan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana IKM. | 1. Meningkatkan potensi keberlanjutan IKM dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan indeks inovasi pelaku IKM agar nilai produksinya semain baik.  2. Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat.  3. Mengembangkan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana IKM. | 1. Meningkatkan potensi keberlanjutan IKM dengan membangun sarana dan prasarana yang mampu menunjang dan menaikan indeks inovasi pelaku IKM agar nilai produksinya semain baik.  2. Mewujudkan pembangunan ruang kreativitas (inkubator bisnis) untuk masyarakat.  3. Mengembangkan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana IKM. |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  | terhadap sarana dan prasarana industri. | 4. Mengupayakan perawatan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana industri. | 4. Mengupayakan perawatan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana industri. | 4. Mengupayakan perawatan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana industri. | 4. Mengupayakan perawatan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana industri. |
|  |  |  | Mendorong aksesbilitas dan fasilitas pemberdayaan industri | 1. Meningkatkan penguasaan sistem informasi, riset, dan teknologi di sektor industri.  2. Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD.  3. Peningkatan kualitas sistem informasi industri.  4. Meningkatkan peran pemberdayaan industri untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya IKM terhadap kehidupan sosial, lingkungan hidup, dan penciptaan tenaga kerja. | 1. Meningkatkan penguasaan sistem informasi, riset, dan teknologi di sektor industri.  2. Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD.  3. Peningkatan kualitas sistem informasi industri.  4. Meningkatkan peran pemberdayaan industri untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya IKM terhadap kehidupan | 1. Meningkatkan penguasaan sistem informasi, riset, dan teknologi di sektor industri.  2. Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD.  3. Peningkatan kualitas sistem informasi industri.  4. Meningkatkan peran pemberdayaan industri untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya IKM terhadap kehidupan sosial, | 1. Meningkatkan penguasaan sistem informasi, riset, dan teknologi di sektor industri.  2. Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD.  3. Peningkatan kualitas sistem informasi industri.  4. Meningkatkan peran pemberdayaan industri untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya IKM terhadap kehidupan sosial, | 1. Meningkatkan penguasaan sistem informasi, riset, dan teknologi di sektor industri.  2. Meningkatkan kerjasama dengan ahli terkait RnD.  3. Peningkatan kualitas sistem informasi industri.  4. Meningkatkan peran pemberdayaan industri untuk mengoptimalkan dampak positif munculnya IKM terhadap kehidupan sosial, |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  | 5. Meningkatkan proteksi terhadap sistem informasi industri.  6. Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing industri. | sosial, lingkungan hidup, dan penciptaan tenaga kerja.  5. Meningkatkan proteksi terhadap sistem informasi industri.  6. Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing industri. | lingkungan hidup, dan penciptaan tenaga kerja.  5. Meningkatkan proteksi terhadap sistem informasi industri.  6. Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing industri. | lingkungan hidup, dan penciptaan tenaga kerja.  5. Meningkatkan proteksi terhadap sistem informasi industri.  6. Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing industri. | lingkungan hidup, dan penciptaan tenaga kerja.  5. Meningkatkan proteksi terhadap sistem informasi industri.  6. Mengupayakan kemitraan dengan stakeholders dalam meningkatkan daya saing industri. |
|  |  | Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri | Mendorong penguasaan teknologi serta Research and Development dikalangan IKM | 1. Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri.  2. Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga | 1. Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri. | 1. Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri. | 1. Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri. | 1. Mendorong dan Menyediakan akses peningkatan penguasaan teknologi dan menumbuhkan riset dikalangan industri. |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  | riset | 2. Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga riset | 2. Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga riset | 2. Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga riset | 2. Mengembangkan sinergitas riset dengan lembaga riset |
|  |  |  | Mendorong perluasan pangsa pasar dan perbaikan daya saing produk IKM | 1. Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan.  2. Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran.  3. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri  4. Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi | 1. Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan.  2. Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran.  3. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri  4. Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi | 1. Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan.  2. Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran.  3. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri  4. Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi | 1. Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan.  2. Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran.  3. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri  4. Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi | 1. Meningkatkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku IKM dengan menerapkan pembangunan IKM secara progresif dan berbasis ekonomi kerakyatan.  2. Memperkuat eksposur publikasi dan kanal pemasaran.  3. Meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja industri  4. Mewujudkan tenaga kerja bersertifikasi |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  | 5. Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM. | 5. Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM. | 5. Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM. | 5. Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM. | 5. Memperluas jaringan kemitraan untuk pemasaran IKM. |
|  |  |  | Mendorong konsep Collaborative Governance dalam pembangunan sumber daya industri | 1. Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan | 1. Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan | 1. Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan | 1. Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan | 1. Mengupayakan kolaborasi antar stakeholders agar tercipta jaringan usaha yang luas dan kuat, berdaya saing global, dan berkelanjutan |
|  |  |  | Mendorong tertib industri hijau | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau.  2. Mengupayakan agar IKM tertib dalam penerapan industri hijau. | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau.  2. Mengupayakan agar IKM tertib dalam penerapan industri hijau. | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau.  2. Mengupayakan agar IKM tertib dalam penerapan industri hijau. | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau.  2. Mengupayakan agar IKM tertib dalam penerapan industri hijau. | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ikm dan sanksi terhadap ikm yang tidak menerapkan industri hijau.  2. Mengupayakan agar IKM tertib dalam penerapan industri hijau. |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  | Meningkatnya kualitas pasar | Peningkatan sarana prasarana perdagangan | Mewujudkan pasar halal | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat  2. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat  2. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat  2. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI  3. Mengurus sertifikasi halal ke MUI | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat  2. Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI  3. Mengurus sertifikasi halal ke MUI |
|  |  | Menyediakan kawasan terpadu untuk PKL | Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL | 1. Pendataan PKL di Kota Malang | 1. Pendataan PKL di Kota Malang  2. Penyuluhan dan penataan PKL | 1. Pendataan PKL di Kota Malang  2. Penyuluhan dan penataan PKL  3. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL | 1. Pendataan PKL di Kota Malang  2. Penyuluhan dan penataan PKL  3. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL  4. Relokasi PKL | 1. Pendataan PKL di Kota Malang  2. Penyuluhan dan penataan PKL  3. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL  4. Relokasi PKL |
|  |  | Meningkatnya jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif | Pengembangan aspek sumber daya manusia yang potensial untuk menjadi UKM ekonomi kreatif | Pelatihan dan pendampingan bagi UKM ekonomi kreatif | 1. Melaksanakan bimtek peningkatan kualitas produk | 1. Melaksanakan bimtek peningkatan kualitas produk  2. Meningkatkan aspek SDM UKM | 1. Melaksanakan bimtek peningkatan kualitas produk  2. Meningkatkan aspek SDM UKM  3. Meningkatkan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, | 1. Melaksanakan bimtek peningkatan kualitas produk  2. Meningkatkan aspek SDM UKM  3. Meningkatkan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan | | | | |
| Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V |
|  |  |  |  |  |  |  | pengembangan produk dan pemasaran produk | pengembangan produk dan pemasaran produk  4. Melaksanakan pendampingan e-commerce |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang akan terlaksana sesuai yang diharapkan apabila terdapat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaranyang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM( OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | DATA PENCAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN | | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya Kualiltas Koperasi dan Usaha Mikro |  |  | % koperasi sehat |  | 5,14% | 10,15% |  | 40,10% |  | 70,05% |  | 100% |  | 129,70% |  | 129.70% |  | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Program pembinaan Koperasi | % Koperasi Aktif |  |  | 0% | 2.026.440.000 | 79,85% | 1.548.336.000 | 87,10% | 1.979.834.650 | 93,83% | 3.553.367.250 | 100% | 2.456.256.400 | 100% | 2.456.256.400 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi | Jumlah Unit Koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubarannya |  |  | 122 kop | 127.720.000 | 15 kop | 65.975.000 | 17 kop | 75.871.250 | 20 kop | 87.252.000 | 24 kop | 100.339.800 | 24 kop | 100.339.800 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek |  |  | 60 kop | 75.000.000 | 70 org | 45.250.000 | 75 org | 48.530.625 | 80 org | 51.927.800 | 85 org | 55.562.700 | 85 org | 55.562.700 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian |  |  | 70 org | 70.000.000 | 60 org | 51.305.000 | 70 org | 59.000.750 | 80 org | 67.850.900 | 90 org | 78.028.500 | 90 org | 78.028.500 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi |  |  | 70 org | 75.000.000 | 380 org | 217.126.000 | 408 org | 232.867.700 | 436 org | 249.168.500 | 466 org | 266.610.300 | 466 org | 266.610.300 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha | Jumlah Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha |  |  | - | 0 | 1 dok | 80.610.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat |  |  | 20 sertifikat | 80.000.000 | - | 0 | 31 sertifikat | 159.104.000 | 25 sertifikat | 139.595.000 | 25 sertifikat | 153.554.500 | 25 sertifikat | 153.554.500 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (P2UKM) | Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (P2UKM ) |  |  | 100 kop 70 WUB | 470.000.000 | 170 org | 490.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi pembentukan koperasi sariah | Jumlah Koperasi yang menerapkan Koperasi Syariah |  |  | - | 0 | 50 kop | 59.450.000 | 58 kop | 68.367.500 | 67 kop | 78.622.625 | 77 kop | 90.416.000 | 77 kop | 90.416.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimtek Manajemen Koperasi | Jumlah koperai yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP |  |  | - | 0 | 40 kop | 85.200.000 | 46 kop | 97.980.000 | 54 kop | 112.677.000 | 60 kop | 129.578.600 | 60 kop | 129.578.600 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan |  |  | - | 0 | - | 0 | 35 kop | 159.000.000 | 65 kop | 1.685.400.000 | 70 kop | 200.000.000 | 70 kop | 200.000.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Permasalahan Permodalan | Jumlah Fasilitasi Permasalahan permodalan |  |  | - | 0 | - | 0 | 45 kasus | 172.500.000 | 50 kasus | 198.375.000 | 60 kasus | 230.000.000 | 60 kasus | 230.000.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Klinik Koperasi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi |  |  | - | 0 | 330 org | 94.850.000 | 380 org | 109.077.500 | 436 org | 125.439.125 | 502 org | 144.255.000 | 502 org | 144.255.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi |  |  | - | 0 | 40 kop | 10.302.000 | 46 kop | 11.847.300 | 53 kop | 13.624.400 | 60 kop | 15.668.000 | 60 kop | 15.668.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes |  |  | 40 kop | 111.240,000 | 135 kop | 198.888.000 | 353 kop | 258.455.100 | 494 kop | 335.862.400 | 641 kop | 486.453.100 | 641 kop | 486.453.100 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang patuh |  |  | 60 kop | 70.000.000 | 95 kop | 52.500.000 | 117 kop | 68.223.750 | 152 kop | 88.656.800 | 197 kop | 114.987.900 | 197 kop | 114.987.900 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Pemeriksaan, penguatan administrasi Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa |  |  | 60 kop | 137.480.000 | 0 kop | 0 | 0 kop | 0 | 0 kop | 0 | 0 kop | 0 | 0 kop | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa |  |  | 0 kop | 0 | 60 kop | 40.630.000 | 78 kop | 52.798.700 | 101 kop | 68.611.900 | 131 kop | 88.989.700 | 131 kop | 88.989.700 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimbingan Teknis manajemen pengawas koperasi | Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek |  |  | 60 kop | 75.000.000 | 60 kop | 56.250.000 | 78 kop | 73.096.875 | 101 kop | 94.989.400 | 131 kop | 123.201.300 | 131 kop | 123.201.300 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Monitoring dan evaluasi pengawasan | Jumlah Unit Koperasi dimonitoring |  |  | - | 0 | - | 0 | 20 kop | 20.056.000 | 23 kop | 23.064.400 | 26 kop | 26.524.000 | 26 kop | 26.524.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi |  |  | - | 0 | - | 0 | 75 kop | 115.000.000 | 90 kop | 132.250.000 | 105 kop | 152.087.000 | 105 kop | 152.087.000 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Sarasehan Peringatan Hari Koperasi | Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sarasehan |  |  | 300 kop | 225.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimtek Akuntansi Simpan Pinjam Sektor Rill dan Laporan Keuangan SAKETAP | Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek akuntansi usaha simpan pinjam sektor riil dan laporan keuangan SAKETAP |  |  | 60 kop | 150.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi | Jumlah koperasi yang mengikuti workshop standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen simpan pinjam koperasi |  |  | 60 kop | 70.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha | Jumlah dokumen penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha |  |  | 2 dok | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi | Jumlah unit pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi |  |  | 60 org | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan Pajak | Jumlah pengurus koperasi syariah yang mengikuti bimbingan teknis |  |  | 60 kop | 140.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang koperasi | Kota Malang |
|  |  |  | Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan |  |  |  |  | 75 kop | 172.224.000 | 81 kop | 198.057.600 | 99 kop | 227.763.300 | 114 kop | 261.931.300 | 114 kop | 261.931.300 | Bidang koperasi | Kota Malang |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro |  |  | % pertumbuhan usaha kecil |  |  | 7,90% |  | 11,22% |  | 40,79% |  | 70,39% |  | 99,99% |  | 129,58% |  | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Program Pengembangan Usaha Mikro | % Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil |  |  | 0,47% | 1.608.720.000 | 40,79% | 1.999.684.750 | 70,39% | 3.591.591.600 | 99,90% | 3.116.234.250 | 129,58% | 4.168.216.800 | 129,58% | 4.168.216.800 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang | Jumlah usaha mikroyang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan |  |  | 24 UM | 800.000.000 | 27 UM | 538.197.750 | 35 UM | 697.504.300 | 45 UM | 903.965.600 | 59 UM | 1.171.539.400 | 59 UM | 1.171.539.400 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindunganusaha |  |  | - | 0 | 30 surat ijin, 18 sertifikat, 6 hak merek | 131.250.000 | 39 surat ijin, 23 sertifikat, 8 hak merek | 170.100.000 | 50 surat ijin, 30 sertifikat, 10 hak merek | 220.449.600 | 65 surat ijin, 39 sertifikat, 13 hak merek | 285.702.900 | 65 surat ijin, 39 sertifikat, 13 hak merek | 285.702.900 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Klinik Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi denganpendampingan klinik |  |  | 240 UM | 81.240.000 | 3.000 org | 200.860.000 | 3.888 org | 260.314.600 | 5.039 org | 337.367.700 | 6.530 org | 437.228.500 | 6.530 org | 437.228.500 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline |  |  | - | 0 | 56 UM | 75.000.000 | 73 UM | 97.200.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis |  |  | 10 UM | 200.000.000 | 3 MOU | 100.000.000 | 4 MOU | 129.600.000 | 5 UM | 67.961.600 | 7 UM | 217.678.300 | 7 UM | 217.678.300 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi |  |  | 60 UM | 50.000.000 | 60 org | 37.500.000 | 78 UM | 48.600.000 | 107 org | 62.985.600 | 137 UM | 81.629.400 | 137 UM | 81.629.400 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Penyusunan Database Usaha Mikro | Jumlah database usaha mikro |  |  | 1 dok | 202.480.000 | 1 aplikasi | 136.720.000 | 1 aplikasi | 177.189.200 | 1 aplikasi | 229.637.200 | 1 aplikasi | 297.586.900 | 1 aplikasi | 297.586.900 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga |  |  | - | 0 | 60 UM | 43.005.000 | 78 UM | 55.734.500 | 107 UM | 55.734.600 | 137 UM | 72.231.900 | 137 UM | 72.231.900 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi peningkatan mutu, desain produk usaha dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan |  |  | - | 0 | 120 UM | 140.960.000 | 156 UM | 182.684.200 | 185 UM | 236.758.700 | 240 UM | 306.839.300 | 240 UM | 306.839.300 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan |  |  | - | 0 | 30 UM | 596.192.000 | 38 UM | 772.664.800 | 50 UM | 1.001.373.650 | 65 UM | 1.297.780.200 | 65 UM | 1.297.780.200 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi perizinan penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/perlindungan bagi usaha mikro | Jumlah peserta sosialisasi perizinan penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/ perlindungan bagi usaha mikro |  |  | 180 org | 175.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara online | Jumlah UM yang mengikuti bimtek promosi/pemasaran secara online |  |  | 60 UM | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro |  |  | % pertumbuhan usaha kecil |  |  |  |  | 48,60% |  | 74,28% |  | 99,97% |  | 125,67% |  | 125,6% |  | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Program pembinaan lingkungan sosial dibidang Usaha Mikro | Prosentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh |  |  | 0,43% | 1.000.000.000 | 22,91% | 1.000.000.000 | 48,60% | 1.000.000.000 | 99,79% | 1.158.139.900 | 125,6% | 1.489.858.445 | 125,6% | 1.489.858.445 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) |  |  | 410 org | 744.852.000 | 420 org | 642.792.800 | 450 org | 650.000.000 | 655 org | 876.004.900 | 849 org | 1.135.214.750 | 849 org | 1.135.214.750 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (usaha mikro) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) |  |  | 30 org | 255.148.000 | 70 org | 357.207.200 | 88 org | 350.000.000 | 111 org | 282.135.000 | 140 org | 354.643.695 | 140 org | 354.643.695 | Bidang Usaha Mikro | Kota Malang |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri |  |  | Pertumbuhan industri | 1,95 | 3,67 | 3,70 |  | 3,88 |  | 4,15 |  | 4,41 |  | 4,67 |  | 4,67 |  | Bidang Industri | Kota Malang |
|  | Program Pengembangan Industri | Persentase peningkatan jumlah IKM |  |  |  | 5.553.000.000 | 2% | 5.343,000,000 | 2% | 7,950,000,000 | 2% | 8,600,000,000 | 2% | 8,750,000,000 | 2% | 8,750,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  | Pencitraan Produk Industri Kreatif | Jumlah jenis produk yang di branding |  |  | - | 0 | 2 jenis | 500,000,000 | 2 jenis | 550,000,000 | 2 jenis | 600,000,000 | 2 jenis | 650,000,000 | 2 jenis | 650,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan Kemitraan bagi Industri | Jumlah perjanjian kerjasama |  |  | 3 MoU kemitraan | 50.000.000 | 3 perjanjian kerjasama | 150,000,000 | 3 perjanjian kerjasama | 150,000,000 | 3 perjanjian kerjasama | 150,000,000 | 3 perjanjian kerjasama | 150,000,000 | 3 perjanjian kerjasama | 150,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penyelenggaraan event Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif |  |  | - | 0 | 800 pelaku industri kreatif/tahun | 300,000,000 | 800 pelaku industri kreatif/tahun | 900,000,000 | 800 pelaku industri kreatif/tahun | 1,000,000,000 | 800 pelaku industri kreatif/tahun | 1,000,000,000 | 800 pelaku industri kreatif/tahun | 1,000,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Workshop Teknis Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop |  |  | - | 0 | 300 IKM kreatif | 300,000,000 | 600 IKM kreatif | 900,000,000 | 600 IKM kreatif | 1,000,000,000 | 600 IKM kreatif | 1,000,000,000 | 600 IKM kreatif | 1,000,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Forum stakeholder industri | Jumlah dokumen perumusanrancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang |  |  | - | 0 | 50 orang | 100,000,000 | 50 orang | 125,000,000 | 50 orang | 150,000,000 | 50 orang | 175,000,000 | 50 orang | 175,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Operasional dan aktifasi MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC |  |  | - | 0 | 500 pelaku kreatif | 10.000.000 | 2.000 pelaku kreatif | 500,000,000 | 2.000 pelaku kreatif | 600,000,000 | 2.000 pelaku kreatif | 650,000,000 | 2.000 pelaku kreatif | 650,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Jumlah SDM industri yang tersetifikasi |  |  | - | 0 | 50 orang | 250,000,000 | 50 orang | 275,000,000 | 50 orang | 300,000,000 | 50 orang | 325,000,000 | 50 orang | 325,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan desain dan teknologi | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi |  |  | - | 0 | 100 produk | 500,000,000 | 100 produk | 500,000,000 | 100 produk | 500,000,000 | 100 produk | 500,000,000 | 100 produk | 500,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau |  |  | - | 0 | 5 IKM | 100,000,000 | 5 IKM | 100,000,000 | 5 IKM | 100,000,000 | 5 IKM | 100,000,000 | 5 IKM | 100,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan penerapan standar mutu produk IKM | Jumlah ikm yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu |  |  | - | 0 | 50 IKM | 198,000,000 | 50 IKM | 225,000,000 | 50 IKM | 250,000,000 | 50 IKM | 250,000,000 | 50 IKM | 250,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pemetaan penyedia bahan baku | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri |  |  | - | 0 | 1 dokumen | 75,000,000 | 1 dokumen | 125,000,000 | 1 dokumen | 150,000,000 | 1 dokumen | 150,000,000 | 1 dokumen | 150,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan/ Revitalisasi Sentra IKM | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi |  |  | - | 0 | 1 sentra IKM | 660,000,000 | 1 sentra IKM | 1,000,000,000 | 1 sentra IKM | 1,000,000,000 | 1 sentra IKM | 1,000,000,000 | 1 sentra IKM | 1,000,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Inkubator industri | Jumlah IKM yang mengikuti inkubasi |  |  | - | 0 | 20 IKM | 431,500,000 | 20 IKM | 600,000,000 | 20 IKM | 700,000,000 | 20 IKM | 700,000,000 | 20 IKM | 700,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penguatan Kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas |  |  | 4 lembaga IKM | 44,000,000 | 4 lembaga IKM | 100,000,000 | 4 lembaga IKM | 100,000,000 | 4 lembaga IKM | 100,000,000 | 4 lembaga IKM | 100,000,000 | 4 lembaga IKM | 100,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi |  |  | - | 0 | 20 IKM | 500,000,000 | 20 IKM | 800,000,000 | 20 IKM | 850,000,000 | 20 IKM | 850,000,000 | 20 IKM | 850,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Data Industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi |  |  | - | 0 | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | 268,500,000 | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | 200,000,000 | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | 200,000,000 | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | 200,000,000 | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan | 200,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penyuluhan bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan |  |  | - | 0 | 150 IKM | 100,000,000 | 150 IKM | 125,000,000 | 150 IKM | 150,000,000 | 150 IKM | 150,000,000 | 150 IKM | 150,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penumbuhan wirusaha baru industri | Jumlah wub |  |  | - | 0 | 10 wub industri | 500,000,000 | 10 wub industri | 175,000,000 | 10 wub industri | 200,000,000 | 10 wub industri | 200,000,000 | 10 wub industri | 200,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pemantauan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi |  |  | - | 0 | 100 IKM | 100,000,000 | 100 IKM | 100,000,000 | 100 IKM | 100,000,000 | 100 IKM | 100,000,000 | 100 IKM | 100,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan produk IKM | Jumlah produk yang dikembangkan |  |  | - | 0 | 5 produk | 200,000,000 | 5 produk | 500,000,000 | 5 produk | 500,000,000 | 5 produk | 500,000,000 | 5 produk | 500,000,000 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan industri hijau pada sektor industri tekstil dan aneka | Jumlah IKM yang menerapkan industri yang berwawasan lingkungan pada sektor industri tekstil dan aneka |  |  | 30 IKM | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan kemitraan bagi IKM ILMATETTA | Jumlah MoU kemitraan |  |  | 3 MoU | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pengawasan industri ILMATETTA | Jumlah IKM sektor ILMATETTA yang mendapatkan pembinaan pada kegiatan pengawasan dan pembinaan |  |  | 100 IKM | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan ekspor produk ILMATETTA | Jumlah IKM berpotensi ekspor yang mengikuti sosialisasi tata cara ekspor |  |  | 25 IKM | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri logam, mesin dan alat transportasi | Jumlah pendampingan penerapan standarisasi mutu pada IKM logam, mesin dan alat transportasi |  |  | 8 kali | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi promosi industri unggulan kota ILMATETTA | Jumlah IKM Dekranasda yang mendapat fasilitas promosi |  |  | 15 IKM | 1.980.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan industri hijau sektor agro dan hasil hutan | Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan industri yang berwawasan lingkungan |  |  | 30 IKM | 75.000.0000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kimia | Jumlah pendampingan penerapan standarisasi mutu pada IKM Kimia |  |  | 10 kali | 150.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pengawasan industri sektor agro, kimia, makanan dan minuman | Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pada kegiatan pengawasan dan pengendalian |  |  | 100 IKM | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri makanan dan minuman | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan penerapan standarisasi mutu produk |  |  | 9 IKM makanan dan minuman | 189.500.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pencitraan produk industri kreatif elektronika dan telematika | Jumlah jenis media branding produk industri |  |  | 2 jenis media | 1.350.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penyelenggaraan event industri kreatif elektronika dan telematika | Jumlah pelaku industri kreatif elektronika, telematika yang mengikuti event kreatif |  |  | 150 pelaku industri kreatif elektronika dan telematika | 350.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Workshop teknis industri kreatif ILMATETTA | Jumlah IKM ILMATETTA yang mengikuti workshop |  |  | 100 IKM | 300.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penyelenggaraan event industri kreatif makanan dan minuman | Jumlah pelaku industri kreatif makanan dan minuman yang mengikuti event kreatif |  |  | 300 pelaku industri kreatif makanan dan minuman | 300.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pencitraan produk industri kreatif makanan dan minuman | Jumlah media pencitraan |  |  | 2 media | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif makanan dan minuman | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan penerapan standarisasi mutu produk |  |  | 13 IKM Kripik | 189.500.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan produk ekspor kreatif makanan dan minuman | Jumlah IKM mamin berpotensi ekspor yang mendapatkan pelatihan pengembangan produk |  |  | 50 IKM | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Program Pembinaan Industri (Cukai) | Persentase IHT yang dibina |  |  |  | 1.500.000.000 | 30% | 526,711,882 | 30% | 526,711,882 | 30% | 526,711,882 | 30% | 526,711,882 | 30% | 526,711,882 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pendataan Dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok | Jumlah mesin pelinting yang di awasi |  |  | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 85.000.000 | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 263,355,941 | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 263,355,941 | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 263,355,941 | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 263,355,941 | 40 Mes in Pelin ting Ro kok | 263,355,941 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT |  |  | 1 dok | 75.000.000 | 1 dok | 263,355,941 | 1 dok | 263,355,941 | 1 dok | 263,355,941 | 1 dok | 263,355,941 | 1 dok | 263,355,941 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan | Jumlah kegiatan berbasis kompetensi dan jumlah |  |  | 20 IKM | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor ILMATETTA | peserta yang memiliki sertifikat kompetensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi | Jumlah kegiatan dan jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru |  |  | 60 IKM | 300.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka | Jumlah kegiatan dan jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru |  |  | 10 WUB Industri | 300.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro,kimia, makanan dan minuman | Jumlah kegiatan berbasis kompetensi dan jumlah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi |  |  | 20 IKM mendapat sertifikat kompetensi | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan | Jumlah kegiatan dan jumlah IKM binaan yang menerapkan pengembangan teknologi |  |  | 15 IKM | 150.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia | Jumlah kegiatan pengembangan inovasi dan persentase IKM binaan yang mampu mengembangkan inovasi |  |  | 50 IKM | 75.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman | Jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi |  |  | 8 IKM | 250.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
|  |  |  | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui forum tatap muka | Jumlah IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai |  |  | 31 IHT | 65.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bidang Industri | Kota Malang |
| Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen serta stabilitas harga pokok dan bahan penting lainnya |  |  | Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu |  | 2% | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
| Program Bina Perdagangan | Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Tersa Sah | 80% | 90% | 95% | 1.030.000.000 | 100% | 1.345.700.000 | 100% | 1.248.875.000 | 100% | 1.275.046.000 | 100% | 1.292.522.000 | 100% | 1.292.522.000 | UPT. Metrologi | Kota Malang |
|  |  |  | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 12 jenis | 24 jenis | 20 jenis | 400.000.000 | 22 jenis | 400.000.000 | 23 jenis | 410.000.000 | 24 jenis | 420.250.000 | 25 jenis | 430.756.000 | 25 jenis | 430.756.000 | UPT. Metrologi | UPT. Metrologi |
|  |  |  | Pelayanan tera dan tera ulang | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | 14.341 UTTP | 17.117 UTTP | 13.400 UTTP | 95.000.000 | 13.400 UTTP | 75.000.000 | 13.400 UTTP | 76.875.000 | 13.400 UTTP | 78.796.000 | 13.400 UTTP | 80.766.000 | 13.400 UTTP | 80.766.000 | UPT. Metrologi | Pasar rakyat, SPBU |
|  |  |  | Penyuluhan kemetrologian | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 150 peserta | 150 peserta | 150 peserta | 65.000.000 | 150 peserta | 110.000.000 | 150 peserta | 110.000.000 | 150 peserta | 110.000.000 | 150 peserta | 110.000.000 | 150 peserta | 110.000.000 | UPT. Metrologi | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Pos ukur ulang barang non BDKT | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | 22 kali | 22 kali | 50.000.000 | 22 kali | 45.000.000 | 22 kali | 46.000.000 | 22 kali | 47.000.000 | 22 kali | 48.000.000 | 22 kali | 48.000.000 | UPT. Metrologi | Pasar rakyat |
|  |  |  | Sosialisasi konsumen cerdas | Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas | 0 peserta | 150 peserta | 150 peserta | 50.000.000 | 250 peserta | 200.000.000 | 250 peserta | 200.000.000 | 300 peserta | 207.000.000 | 300 peserta | 207.000.000 | 300 peserta | 207.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang dan di sekolah |
|  |  |  | Edukasi konsumen | Jumlah peserta edukasi konsumen | 300 peserta | 200 peserta | 150 peserta | 75.000.000 | 0 peserta | 0 | 0 peserta | 0 | 0 peserta | 0 | 0 peserta | 0 | 0 peserta | 0 | Bidang Perdagangan | SMA di Kota Malang |
|  |  |  | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media | 90 kali | 90 kali | 45 kali | 100.000.000 | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio | 190.000.000 | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio | 190.000.000 | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio | 190.000.000 | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio | 192.000.000 | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio | 192.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Operasi pasar dan pasar murah | Jumlah pengadaan pasar murah | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 15.000.000 | 1 kali | 110.700.000 | 1 kali | 111.000.000 | 1 kali | 111.000.000 | 1 kali | 113.000.000 | 1 kali | 113.000.000 | Bidang Perdagangan | Pasar rakyat |
|  |  |  | Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 0 hari | 365 hari | 365 hari | 100.000.000 | 0 hari | 0 | 0 hari | 0 | 0 hari | 0 | 0 hari | 0 | 0 hari | 0 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 0 hari | 0 hari | 0 hari | 0 | 365 hari | 70.000.000 | 365 hari | 70.000.000 | 365 hari | 75.000.000 | 365 hari | 75.000.000 | 365 hari | 75.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2 kali | 2 kali | 3 kali | 50.000.000 | 2 kali | 35.000.000 | 2 kali | 35.000.000 | 2 kali | 36.000.000 | 2 kali | 36.000.000 | 2 kali | 36.000.000 | Bidang Perdagangan | Agen/distributor di Kota Malang |
|  |  |  | Kajian bahan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah buku kajian tentang pemanfaatan LPG 3 Kg dan 5 Kg | 0 buku | 0 buku | 0 buku | 0 | 10 buku | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi kebijakan pemanfaatan LPG 3 Kg dan 5 Kg | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemanfaatan LPG 3 Kg dan 5 Kg | 0 peserta | 0 peserta | 0 peserta | 0 | 75 peserta | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Pengadaan timbangan meja untuk tera | Jumlah pengadaan timbangan meja | 0 unit | 0 unit | 37 unit | 30.000.000 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Program Bina Perdagangan | Persentase pertumbuhan UKM | 0,25% | 0,35% | 0,45% | 1.325.000.000 | 0.50% | 1.500.000.000 | 1% | 1.750.000.000 | 1.25% | 2.000.000.000 | 1.50% | 2.250.000.000 | 1.50% | 2.250.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 70 UKM | 77 UKM | 85 UKM | 25.000.000 | 100 UKM | 55.000.000 | 110 UKM | 65.000.000 | 120 UKM | 75.000.000 | 130 UKM | 85.000.000 | 130 UKM | 85.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Promosi perdagangan produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 15 UKM | 15 UKM | 20 UKM | 900.000.000 | 20 UKM | 1.000.000.000 | 20 UKM | 1.170.000.000 | 20 UKM | 1.300.000.000 | 20 UKM | 1.400.000.000 | 20 UKM | 1.400.000.000 | Bidang Perdagangan | Di Indonesia |
|  |  |  | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 0 UKM | 0 UKM | 15 UKM | 25.000.000 | 19 UKM | 60.000.000 | 19 UKM | 65.000.000 | 19 UKM | 75.000.000 | 19 UKM | 100.000.000 | 19 UKM | 100.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Jumlah UKM yang di data | 200 dat | 300 data | 400 data | 50.000.000 | 600 data | 75.000.000 | 600 data | 100.000.000 | 650 data | 125.000.000 | 650 data | 150.000.000 | 650 data | 150.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan gudang | Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 6 kali pengawasan | 6 kali pengawasan | 8 kali pengawasan | 50.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 50.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 60.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 75.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 100.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 100.000.000 | Bidang Perdagangan | Gudang di Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sarana usaha/ distribusi perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | 0 toko | 0 toko | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 50.000.000 | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 65.000.000 | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 75.000.000 | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 85.000.000 | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 90.000.000 | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan | 90.000.000 | Bidang Perdagangan | Toko modern di Kota Malang |
|  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan minuman beralkohol | Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | 6 kali pengawasan | 6 kali pengawasan | 8 kali pengawasan | 50.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 50.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 55.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 65.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 75.000.000 | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan | 75.000.000 | Bidang Perdagangan | Penjual minuman beralkohol di Kota Malang |
|  |  |  | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 80 UKM | 200 UKM | 130 UKM | 100.000.000 | 80 UKM | 95.000.000 | 80 UKM | 100.000.000 | 80 UKM | 125.000.000 | 80 UKM | 150.000.000 | 80 UKM | 150.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | E-Commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 0 UKM | 0 UKM | 100 UKM | 75.000.000 | 125 UKM | 50.000.000 | 125 UKM | 60.000.000 | 140 UKM | 75.000.000 | 140 UKM | 100.000.000 | 140 UKM | 100.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatnya kualitas pasar |  |  | Persentase pasar halal | 0 % | 0 % | 0% |  | 8% |  | 11.54% |  | 15.38% |  | 19.23% |  | 19.23% |  | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 0 % | 0 % | 0% | 17.709.508.000 | 8% | 20.000.000.000 | 11.54% | 20.000.000.000 | 15.38% | 20.000.000.000 | 19.23% | 20.000.000.000 | 19.23% | 20.000.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Penataan dan penyuluhan PKL | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 200 PKL | 90 PKL | 110 PKL | 80.000.000 | 110 PKL | 100.000.000 | 90 PKL | 125.000.000 | 90 PKL | 150.000.000 | 90 PKL | 175.000.000 | 90 PKL | 175.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Pengawasan dan pengendalian PKL | Jumlah papan himbauan PKL | 25 unit | 25 unit | 0 unit | 0 | 25 unit | 100.000.000 | 25 unit | 125.000.000 | 25 unit | 150.000.000 | 25 unit | 150.000.000 | 25 unit | 150.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Penataan ketertiban pasar | Jumlah pelaksanaan operasi ketertiban pasar | 147 hari | 140 hari | 251 hari | 0 | 312 hari | 3.074.776.000 | 312 hari | 3.382.250.000 | 312 hari | 3.720.478.000 | 312 hari | 4.092.525.000 | 312 hari | 4.092.525.000 | Bidang Perdagangan | 26 pasar |
|  |  |  | Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung dan bangunan pasar rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | 10 pasar | 17 pasar | 6 pasar | 13.277.290.000 | 5 pasar | 10.182.770.290 | 4 pasar | 9.321.760.000 | 4 pasar | 8.533.532.000 | 4 pasar | 7.776.485.000 | 4 pasar | 7.776.485.000 | Bidang Perdagangan | Pasar rakyat |
|  |  |  | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | - | - | 150 pedagang | 300.000.000 | 146 pedagang | 300.000.000 | 150 pedagang | 350.000.000 | 150 pedagang | 400.000.000 | 150 pedagang | 500.000.000 | 150 pedagang | 500.000.000 | Bidang Perdagangan | Pasar rakyat |
|  |  |  | Revitalisasi pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 4 pasar | 6 pasar | 2 pasar | 2.954.218.000 | 2 pasar | 5.045.990.000 | 2 pasar | 5.045.990.000 | 2 pasar | 5.045.990.000 | 2 pasar | 5.045.990.000 | 2 pasar | 5.045.990.000 | Bidang Perdagangan | Pasar rakyat |
|  |  |  | Pembinaan Pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia | 80 peserta | 420 peserta | 65 peserta | 75.000.000 | 100 peserta | 125.000.000 | 80 peserta | 150.000.000 | 80 peserta | 175.000.000 | 80 peserta | 200.000.000 | 80 peserta | 200.000.000 | Bidang Perdagangan | Hotel di Kota Malang |
|  |  |  | Pengadaan dan pemeliharaan sarana pasar | Jumlah pengadaan dan perbaikan sarana pasar | 20 unit | 20 unit | 16 unit | 75.000.000 | 20 unit | 200.000.000 | 20 unit | 250.000.000 | 20 unit | 300.000.000 | 20 unit | 350.000.000 | 20 unit | 350.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | 0 peserta | 0 peserta | 160 peserta | 248.000.000 | 100 peserta | 0 | 100 peserta | 100.000.000 | 100 peserta | 100.000.000 | 100 peserta | 100.000.000 | 100 peserta | 100.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Extensifikasi dan Intensifikasi retribusi pasar | Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah | 44 kali | 44 kali | 44 kali | 75.000.000 | 0 kali | 0 | 44 kali | 50.000.000 | 44 kali | 50.000.000 | 44 kali | 50.000.000 | 44 kali | 50.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Pendataan pedagang pasar rakyat | Jumlah pedagang yang akan di data | 320 pedagang | 421 pedagang | 247 pedagang | 50.000.000 | 0 pedagang | 0 | 250 pedagang | 50.000.000 | 250 pedagang | 50.000.000 | 250 pedagang | 50.000.000 | 250 pedagang | 50.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pasar dengan pihak ketiga | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 75.000.000 | 0 kali | 0 | 2 kali | 50.000.000 | 2 kali | 75.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Operasional UPT. Pasar | Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 10 jenis | 11 jenis | 17 jenis | 500.000.000 | 11 jenis | 871.463.710 | 11 jenis | 1.000.000.000 | 15 jenis | 1.250.000.000 | 15 jenis | 1.500.000.000 | 15 jenis | 1.500.000.000 | UPT. Pasar | UPT. Pasar |
| Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan | Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok |  |  | Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu |  | 2% | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  | Program Pemberantasan barang kena cukai illegal (cukai) | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 0% | 0% | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | Bidang Perdagangan | Kota Malang |
|  |  |  | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 6 kali | 12 kali | 22 kali | 200.000.000 | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | 150.000.000 | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | 150.000.000 | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | 150.000.000 | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | 150.000.000 | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan | 150.000.000 | Bidang Perdagangan | Penjual rokok di Kota Malang |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |  |  | Nilai SAKIP |  |  | 80.50 |  | 80.67 |  | 80.90 |  | 81 |  | 81.20 |  | 81.20 |  | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 9.514.569.000 | 100% | 8.041.264.250 | 100% | 8.223.544.000 | 100% | 8.410.376.500 | 100% | 8.601.889.000 | 100% | 8.601.889.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1.500 surat | 2.200 surat | 7.300 surat | 858.260.000 | 2.300 surat | 881.010.000 | 2.400 surat | 903.035.000 | 2.500 surat | 925.611.000 | 2.600 surat | 948.751.000 | 2.600 surat | 948.751.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 196.000.000 | 12 bulan | 150.000.000 | 12 bulan | 153.750.000 | 12 bulan | 157.593.000 | 12 bulan | 161.533.000 | 12 bulan | 161.533.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 441.000 m2 | 441.000m2 | 1.183.284 m2 | 883.520.000 | 1.182.384 m2 | 1.055.645.000 | 1.182.384 m2 | 1.082.036.000 | 1.182.384 m2 | 1.109.087.000 | 1.182.384 m2 | 1.136.814.000 | 1.182.384 m2 | 1.136.814.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 56 jenis | 23 jenis | 51 jenis ATK | 145.000.000 | 54 jenis ATK | 364.100.000 | 54 jenis ATK | 373.202.000 | 54 jenis ATK | 382.532.000 | 54 jenis ATK | 392.095.000 | 54 jenis ATK | 392.095.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penagandaan | 14 jenis | 14 jenis | 32 jenis | 435.000.000 | 16 jenis | 320.000.000 | 16 jenis | 328.000.000 | 16 jenis | 336.200.000 | 16 jenis | 344.605.000 | 16 jenis | 344.605.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 9 jenis | 8 jenis | 18 jenis | 28.000.000 | 8 jenis | 27.250.000 | 8 jenis | 27.931.000 | 8 jenis | 28.629.000 | 8 jenis | 29.345.000 | 8 jenis | 29.345.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis surat kabar | 3 jenis surat kabar | 3 jenis surat kabar | 47.000.000 | 3 jenis surat kabar | 27.000.000 | 3 jenis surat kabar | 27.675.000 | 3 jenis surat kabar | 28.366.000 | 3 jenis surat kabar | 29.076.000 | 3 jenis surat kabar | 29.076.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 2.514 kotak | 2.304 kotak | 2.376 kotak | 110.000.000 | 2.400 kotak | 453.648.000 | 2.435 kotak | 464.989.000 | 2.496 kotak | 476.613.000 | 2.558 kotak | 488.529.000 | 2.558 kotak | 488.529.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 78 kali | 91 kali | 126 kali | 850.000.000 | 45 kali | 865.000.000 | 45 kali | 886.625.000 | 45 kali | 908.790.000 | 45 kali | 931.510.000 | 45 kali | 931.510.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Peringatan/ kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali | 1 kali | 5 kali | 145.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | 2 kali | 100.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengelolaan perpustakaan dan arsip | Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip | 0 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 35.000.000 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 19 jenis | 16 jenis | 23 jenis | 315.000.000 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 0 jenis | 0 jenis | 0 jenis | 0 | 11 jenis | 394.471.250 | 11 jenis | 404.333.000 | 11 jenis | 414.441.000 | 11 jenis | 424.802.000 | 11 jenis | 424.802.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan | 120 stel | 310 stel | 190 stel | 16.645.000 | 0 stel | 0 | 0stel | 0 | 0 stel | 0 | 0 stel | 0 | 0 stel | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan pakaian dinas/ pakaian khusus | Jumlah pakaian dinas/ pakaian khusus | 0 stel | 0 stel | 0 stel | 0 | 250 stel | 200.000.000 | 256 stel | 205.000.000 | 262 stel | 210.125.000 | 269 stel | 215.378.000 | 269 stel | 215.378.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/ volume BBM dan pelumas | 90.730 iter dan 511 botol minyak pelumas | 77.100 liter dan 480 botol minyak pelumas | 77.100 liter dan 480 botol minyak pelumas | 853.000.000 | 93.078 liter dan 525 botol minyak pelumas | 950.000.000 | 95.404 liter dan 538 botol minyak pelumas | 973.750.000 | 97.790 liter dan 551 botol minyak pelumas | 998.093.000 | 100.234 liter dan 565 botol minyak pelumas | 1.023.046.000 | 100.234 liter dan 565 botol minyak pelumas | 1.023.046.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Dinas Perdagangan |
|  |  |  | Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 105 peserta | 50 peserta | 159 peserta | 176.000.000 | 300 orang | 350.000.000 | 300 orang | 358.750.000 | 300 orang | 367.718.000 | 300 orang | 376.911.000 | 300 orang | 376.911.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 500 m2 | 700 m2 | 1.694 m2 | 391.080.000 | 600 m2 | 500.000.000 | 615 m2 | 512.500.000 | 630 m2 | 525.312.500 | 646 m2 | 538.445.000 | 646 m2 | 538.445.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 24 unit | 36 unit | 50 unit | 648.360.000 | 55 unit | 631.640.000 | 55 unit | 647.431.000 | 55 unit | 663.616.000 | 55 unit | 680.207.000 | 55 unit | 680.207.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara | 4 jenis | 4 jenis | 19 jenis | 82.500.000 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 4 jenis | 4 jenis | 19 jenis | 82.500.000 | 6 jenis | 60.000.000 | 6 jenis | 60.000.000 | 6 jenis | 60.000.000 | 6 jenis | 60.000.000 | 6 jenis | 60.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 0 unit | 6 unit | 15 unit | 1.970.224.000 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | 0 unit | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 0 dok | 0 dok | 6 dok | 15.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penghapusan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang dihapus | 0 jenis | 0 jenis | 0 jenis | 0 | 6 jenis | 150.000.000 | 6 jenis | 150.000.000 | 6 jenis | 150.000.000 | 6 jenis | 150.000.000 | 6 jenis | 150.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 1 dok | 2 dok | 15 dok | 114.240.000 | 2 dok | 30.000.000 | 2 dok | 30.000.000 | 2 dok | 30.000.000 | 2 dok | 30.000.000 | 2 dok | 30.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 dok | 2 dok | 19 dok | 251.669.200 | 2 dokumen | 121.500.000 | 2 dokumen | 124.537.000 | 2 dokumen | 127.650.000 | 2 dokumen | 130.842.000 | 2 dokumen | 130.842.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan bahan anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/ABK PD | 0 dok | 0 dok | 0 dok | 0 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Pelaksanaan survei kepuasa n masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasaan masyarakat | 2 dok | 2 dok | 6 dok | 38.908.300 | 2 dokumen | 20.000.000 | 2 dokumen | 20.000.000 | 2 dokumen | 20.000.000 | 2 dokumen | 20.000.000 | 2 dokumen | 20.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan/ reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 1 dok | 2 dok | 5 dok | 48.162.500 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | 2 dokumen | 25.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dok | 4 dok | 12 dok | 52.000.000 | 4 dokumen | 15.000.000 | 4 dokumen | 15.000.000 | 4 dokumen | 15.000.000 | 4 dokumen | 15.000.000 | 4 dokumen | 15.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan/ reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 0 dok | 1 dok | 1 dok | 175.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen renja/RKT | 0 dok | 1 dok | 4 dok | 195.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | 1 dokumen | 75.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI) | Jumlah sistem pengawasan internal (SPI) | 0 aplikasi | 0 aplikasi | 0 aplikasi | 0 | 1 aplikasi | 50.000.000 | 1 aplikasi | 50.000.000 | 1 aplikasi | 50.000.000 | 1 aplikasi | 50.000.000 | 1 aplikasi | 50.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dok | 1 dok | 2 dok | 85.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | 7 jenis | 30.000.000 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | 0 jenis | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi | Jumlah informasi, publikasi dan komunikasi | - | - | 28 publikasi, 2 penerbitan majalah industri | 200.000.000 | 0 publikasi | 0 | 0 publikasi | 0 | 0 publikasi | 0 | 0 publikasi | 0 | 0 publikasi | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan | - | - | 600 SPM | 82.000.000 | 0 SPM | 0 | 0 SPM | 0 | 0 SPM | 0 | 0 SPM | 0 | 0 SPM | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Penyuluhan bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | - | - | 150 IKM | 40.000.000 | 0 IKM | 0 | 0 IKM | 0 | 0 IKM | 0 | 0 IKM | 0 | 0 IKM | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |
|  |  |  | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi | - | - | 500 m2 | 2.000.000 | 0 m2 | 0 | 0 m2 | 0 | 0 m2 | 0 | 0 m2 | 0 | 0 m2 | 0 | Kesekretariatan Dinas | Dinkopindag |

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2019

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disajikan indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidangurusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Indikator Tujuan: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif | - | 0,846 | 0,847 | 0,848 | 0,850 | 0,851 | 0,852 | 0,852 |
|  | Indeks daya beli/*purchasing power parity* |  | N/A | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,45 | 6,45 |
| 2. | Indikator Sasaran: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % koperasi sehat |  | 5,14% | 10,15% | 40,10% | 70,05% | 100% | 129,70% | 129,70% |
|  | % Pertumbuhan Usaha Kecil |  | 7,90% | 11,22% | 40,79% | 70,39% | 99,99% | 129,58% | 129,58% |
|  | Pertumbuhan Industri | 1.95 | 3.67 | 3,70 | 3,88 | 4,15 | 4,41 | 4,67 | 4,67 |
|  | Persentase pasar halal |  | 0% | 0% | 8% | 11,54% | 15,38% | 19,23% | 19,23% |
|  | Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | Nilai SAKIP | - | - | 80.50 | 80.67 | 80.90 | 81 | 81.20 | 81.20 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Indikator Program |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | % koperasi aktif |  |  | 0% | 79,85% | 87,10% | 93,83% | 100% | 100% |
| 2. | % pertumbuhan unit usaha mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil |  |  | 0,47% | 40,79% | 70,39% | 99,90% | 129,58% | 129,58% |
| 3. | % pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh |  |  | 0,43% | 22,91% | 48,60% | 99,79% | 125,6% | 125,6% |
| 4. | % peningkatan jumlah IKM |  |  | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 5. | % IHT yang dibina |  |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 6. | % pelayanan tera/tera ulang | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | % pertumbuhan UKM | 0,2% | 0,35% | 0,45% | 0,50% | 1% | 1,25% | 1,50% | 1,50% |
| 8 | % penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 0% | 0% | 0% | 8% | 11,54% | 15,38% | 19,23% | 19,23% |
| 9 | % pengawasan barang kena cukai ilegal | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | % dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2019

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Malang dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 serta isu-isu strategis bidang koperasi, Usaha Mikro, Industri, dan Perdagangan. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang untuk jangka waktu 2018-2023.

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2019 hingga tahun 2023. Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan RENSTRA Perangkat Darah Tahun 2018-2023, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai evaluasi dan motivasi bagi organisasi perangkat daerah adapun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RENSTRA Perangkat daerah, berupa :

1. Catatan Penting Penyusunan RENSTRA dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENTRA Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat daerah agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.
2. Kaidah Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan dokumen Rencana Startegis periode 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan. Terwujudnya Renstra OPD merupakan prasyarat bagi setiap OPD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan ,sasaran, program dan kegaitan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan untuk tahun 2018-2023 sesuai dengan RPJMD Kota Malang Periode 2018-2023. Kaidah kaidah pelaksanaan:
3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan berkewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 ini dengan sebaik-baiknya;
4. Kepala Dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
5. Sekretaris dan Kepala Bidang berkewajiban melaksanakan program berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya Renstra ini sebagai program dan kegiatan tahun 2018 -2023;
6. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi membantu secara teknis Sekretaris dan Kepala Bidang dalam pencapaian target kinerja dari setiap kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2018 -2023;
7. Staf membantu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan masing-masing.
8. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dapat melakukan revisi/perubahan terhadap program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi terkini dengan melakukan reviu Renstra OPD Tahun 2018-2023 yang disusun secara paralel dengan penyusunan Perubahan Renstra Kota Malang Tahun 2018 -2023 sebagai pedoman dalam penyusuann Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2018-2023.
9. Rencana Tindak Lanjut
10. Koordinasi dan Konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran OPD.
11. Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui Diklat formal, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur.
12. Mereview pencapaian target kinerja sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.
13. Pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terstruktur dalam mendukung pencapaian target kinerja.
14. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI